SKRIPSI

IMPLIKASI UNIPOLARITAS GEOPOLITIK INTERNASIONAL TERHADAP STABILITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

(Studi Kasus Organisasi Internasional ASEAN)

Oleh

MANGGOLO YUDHO PERDANA
NIM B 111 07 008

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2011

HALAMAN JUDUL

IMPLIKASI UNIPOLARITAS GEOPOLITIK INTERNASIONAL TERHADAP STABILITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

(Studi Kasus Organisasi Internasional ASEAN)

Oleh

MANGGOLO YUDHO PERDANA
B 111 07 008

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
Dalam program kekhususan hukum internasional
Program studi ilmu hukum

Pada

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
AGUSTUS 2011

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLIKASI UNIPOLARITAS GEOPOLITIK INTERNASIONAL TERHADAP STABILITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

(Studi Kasus Organisasi Internasional ASEAN)

Disusun dan diajukan oleh

MANGGOLO YUDHO PERDANA

NIM B 111 07 008

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari

Kamis, 28 Juli 2011

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. S. M. Noor, S.H., M.H.	**Laode Abdul Gani, S.H., M.H.**
NIP. 19550702 198810 1 001	NIP. 19581231 198703 1 008

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa,

Nama	:	MANGGOLO YUDHO PERDANA
Nomor Pokok	:	B111 07 008
Bagian	:	Hukum Internasional
Judul Skripsi	:	**IMPLIKASI UNIPOLARITAS GEOPOLITIK INTERNASIONAL TERHADAP STABILITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Organisasi Internasional ASEAN)**

Telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 28 April 2011

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. S. M. Noor,S.H.,M.H.	**Laode Abdul Gani,S.H.,M.H**
NIP. 19550702 198810 1 001	NIP. 19581231 198703 1 008

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	:	**MANGGOLO YUDHO PERDANA**
Nomor Pokok	:	B111 07 008
Bagian	:	Hukum Internasional
Judul Skripsi	:	**Implikasi Unipolaritas Geopolitik Internasional Terhadap Stabilitas Hubungan Internasional Indonesia (Studi Kasus Organisasi Internasional ASEAN)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir

program studi.

Makassar, Juni 2011

An. Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Manggolo Yudho Perdana (B11107008), Implikasi Unipolaritas Geopolitik Internasional Terhadap Stabilitas Hubungan Internasional Indonesia (Studi Kasus Organisasi Internasional ASEAN). Dibawah bimbingan Bapak Syamsuddin Muhammad Noor dan Bapak Laode Abdul Gani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implikasi unipolaritas geopolitik Internasional terhadap stabilitas hubungan internasional Indonesia dan untuk mengetahui manfaat apa yang didapat Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Regional Asia Tenggara (ASEAN) dalam menjaga perdamaian dan stabilitas hubungan internasional Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Politik Keamanan ASEAN Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN – Direktorat Poltik Keamanan dan Kewilayahan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (KEMLU RI) selama penulis magang di Kementerian Luar Negeri. Dengan metode penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan tidak langsung kepada narasumber terhadap informasi yang dibutuhkan oleh penulis yang berkaitan dengan judul tugas akhir ini, selain itu penulis juga melakukan penelitian berupa telaah pustaka terhadap literatur-literatur baik yang bersifat *hardcopy* maupun *softcopy*.

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut: 1) Bahwa Unipolaritas geopolitik internasional dalam hal ini Unipolaritas Amerika Serikat memiliki implikasi terhadap Indonesia sebagai negara dunia ketiga, dimana dalam melakukan perumusan politik luar negeri, Indonesia yang belum sepenuhnya mampu untuk berdiri sendiri masih tergantung dengan negara lain, khususnya negara besar seperti Amerika Serikat sehingga perumusan politik luar negeri dan pola hubungan internasional Indonesia secara langsung ataupun tidak masih sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat dikarenakan Amerika Serikat memiliki kekuatan bargaining besar yang tidak dimiliki Indonesia sendiri dalam menyeimbangkan posisi tawarnya di dunia internasional. 2) Bahwa manfaat ASEAN sebagai organisasi regional kawasan Asia tenggara yaitu sebagai pemersatu diantara negara di regional Asia Tenggara, yang dapat meredam berbagai potensi konflik serta menjadi salah satu penyeimbang geopolitik internasional dalam memperkuat bargaining negara-negara anggota dalam melakukan hubungan internasional dengan negara besar lainnya.

ABSTRACT

Manggolo Yudho Perdana (B11107008). Implication of International Geopolitics' Unipolarity to the Stability of International Relations of Indonesia (Case Study: International Organization ASEAN). Under the guidance of Syamsuddin Muhammad Noor and Laode Abdul Gani.

This research was aimed to find what is the implication of international geopolitics' unipolarity to the stability of international relations of Indonesia as a member state of South East Asia Regional Organization (ASEAN) in order to maintain peace and stability of Indonesia's international relations.

This research was taken place at Directorate of ASEAN Politics and Security Directorate-General of ASEAN Cooperation – Directorate of Politics, Security, and Region Directorate-General of Laws and Treaties – Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (KEMLU RI) when the author intern at KEMLU RI. The research method was done by direct and indirect interview about informations needed by author that related to the title of this final project, beside that, author also done research by library research of softcopy and hardcopy literatures.

The result of this research are as follows: 1) international geopolitics' unipolarity and in this case is USA's unipolarity have impact to Indonesia as the third world country, where in the process of formulating foreign politics, Indonesia who has not yet completely able to be independent still being dependant of other countries, especially big country, like the USA, therefore the formulation of foreign politics and the scheme of Indonesia's international relations was still affected by the USA directly or indirectly, since the USA has a big capacity to bargain that does not owned by indonesia to stabilize its bargain position internationally. 2) The advantage of ASEAN as the regional organization on South East Asia is as the unifier among countries in the South East Asia region, which can prevent any potential conflicts and also to be one of the counterweight of international geopolitics in order to strengthen the bargaining position of member states in their international relations with other big countries.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim,

Assalamu alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat merampungkan skripsi itu. Shalawat dan Salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAWW berserta Ahlul Bayt-nya yang Suci. Penulis menyadari, skripsi yang penulis tulis itu bukan merupakan suatu yang *instant*. Itu buah dari suatu proses yang relatif panjang, menyita segenap tenaga dan pikiran. Penulisan skripsi ini penulis lakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang pasti, tanpa segenap motivasi, kesabaran, kerja keras, dan do'a – mustahil penulis sanggup untuk menjalani tahap demi tahap dalam kehidupan akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin selama 4 (empat) tahun lamanya.

Hubungan Internasional merupakan hal yang semakin kompleks dan semakin berkembang dan memiliki relevansi yang erat dalam kajian Hukum Internasional. Pergerakan peta politik internasional yang senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek dalam ruang lingkup regional maupun global secara sistemik haruslah selalu diamati implikasinya terhadap perkembangan Hubungan Internasional Indonesia. Mengingat pola perimbangan kekuasaan yang semakin tidak berimbang dengan adanya *state centric*, negara-negara di ASEAN menyadari bahwa dibutuhkan suatu kerjasama yang erat dan baik untuk menjaga

perimbangan kekuasaan global, termasuk dengan melakukan penguatan regional ASEAN.

Pembahasan geopolitik internasional dan regionalisasi kawasan ASEAN belum pernah dibahas sebelumnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ide untuk menulis tugas akhir ini diperoleh penulis pada saat mengambil matakuliah Hubungan Internasional pada semester ganjil 2010/2011 yang di asuh oleh Prof. DR. S.M. Noor, S.H., M.H., dan *Bapak* Laode Abdul Gani, S.H., M.H. yang sangat memberikan inspirasi dan juga menjadi teman diskusi penulis selama penyusunan skripsi ini.

Ada beberapa kendala yang menghambat penulisan tugas akhir ini, salah satunya adalah kurangnya materi yang berhubungan dengan geopolitik internasional di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dikarenakan isu ini merupakan sesuatu hal yang baru ketika dikaji dalam aspek hukum di tingkatan Universitas Hasanuddin. Namun bagaimanapun juga, Alhamdulillah tugas akhir ini pun dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penulis berikan kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis kagumi dan juga sebagai sosok patronase hidup penulis, *Ayahanda* Muhammad Ilyas Mappeare dan *Ibunda* Susi Dwikariwati (alm.), yang telah membesarkan dan mendidik penulis. Penulis mutlak berterima kasih dan sekaligus meminta maaf kepada beliau berdua karena hanya dengan dukungan beliau berdualah penulis dapat melanjutkan pendidikan penulis hingga perguruan tinggi. Penulis

menyadari, tanpa beliau berdua, mustahil penulis bisa menjadi sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang beliau berikan kepada penulis, dari kecil hingga dewasa. Pengorbanan serta kasih sayang kepada penulis yang tak terhitung dan tak terhingga banyaknya.

2. Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya;
3. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh Jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum;
4. Prof. Dr. SM. Noor.,S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus dan Pembimbing I, yang telah berkenan membimbing penulis dalam penulisan skripsi selama 2 (dua) semester. Betapa arahan/petunjuk/bimbingan dari beliau telah menyadarkan penulis akan pentingnya penguasaan teori serta asas dalam Hukum Internasional.
5. *Ibu* Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Sekretaris Bagian Hukum Internasional. Yang telah banyak memacu spirit penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan.
6. *Bapak* Laode Abdul Gani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan masukan dan petunjuk penulisan serta tak henti-hentinya memberikan dorongan dan motivasi yang tinggi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. *Ibu* Harustiati Andi Moein, S.H., M.H. – yang tiga tahun lebih lamanya berperan sebagai PA (Penasehat Akademik) penulis di

Unhas, terimakasih banyak telah sering kali memberikan bonus kredit SKS melebihi batas yang ditentukan.

8. Segenap staf pengajar – *Kanda* Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., *Kanda* Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H., Prof. Dr. Hamid Awaluddin, S.H., L.LM., M.H., Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H., Ibu Inneke Lihawa, S.H., M.H., Dr. Judhariksawan, S.H., M.H., *Pak* Laode M. Syarif, S.H., L.LM., Ph.D., *Pak* Albert Lakolo, S.H., M.H., *Pak* Maskun, S.H., L.LM., *Bu* Birkah Latief, S.H., M.H., *Bu* Tri Feny Widayanti, S.H., M.H., Betapa beliau semua sangat berjasa dalam menggembleng dan memotivasi penulis, terutama dalam pemahaman atas pelbagai konsep dalam hukum. Kepada *Kak* Lyna, *Bu* Ida, *Bu* Sri, *Pak* Ishak, *Pak* Maing Akademik, juga terima kasih atas bantuan administrasi-nya.
9. Ucapan terima kasih juga wajib penulis berikan kepada segenap keluarga besar Mappeare dan Tjitro Wiharjo – juga kepada keluarga Cempaka Putih: *Tante* Melliana Noer (Ta Mel), *Mas* Gemah Agung Dirgantara (Dirga), *Mbak* Citra Lady Angga Dewi (Citra), *Mbak* Windi Audina Mutmainna (Windi) dan *Adik* Admiral Agung Pramadhana (Miral), Om Zulkarnin Farhan Qureshi, Om Agustalin Sahdan, Mbah Kabit, Mbah Mangun – terima kasih atas dukungan dan kasih sayangnya selama ini.
10. *Om* Man Sofyan Ato dan keluarganya, karena selama penulis di Makassar, penulis telah sempat numpang tinggal di sebuah kamar yang sangat nyaman di lantai dua rumahnya di Bukit Khatulistiwa,

Makassar. *Om* Awo, *Om* Makmur, *Om* Ridwan, dan keluarga, berserta pasukan Bukit Khatulistiwa; Nurul Ramadhaniaty, Dian Muthiah, Isfan Anugrah, Fikri van Nugraha, Zahra Aulia M., M. Rifyal Khadafi, Fazkur Keyla M., Azizi El-Shirazy Rozan, Rihannah Aurellia M., Dr. Karta Jayadi, S.Sn, M.Hum, dan keluarga besar Galangan Kapal, yang selalu memberikan inspirasi penulis untuk mengejar cita-cita akademik yang lebih tinggi. Juga banyak terima kasih atas dukungan dan perhatiannya selama penulis berkuliah di Makassar.

11. Rekan-rekan seperjuangan serta senior-senior di Bumi Hijau Hitam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin Cabang Makassar Timur, Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Makassar Timur, dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Makassar Timur; Al-Ustad Arianto Achmad, S.T., *Kanda* Azrijal Al-Aydid, S.H. *Kanda* Andi Ryza Fardiansyah, S.H., *Kanda* Raju Aphandi, S.H., *Kanda* Imran Eka Saputra B., S.H., *Kanda* Rakhmat Indrasakti, S.H., *Kanda Resha Agriansyah, S.H., Kanda* Sulaiman Syamsuddin, S.H., *Kanda* Chaidir Anwar Sangadji, S.H., *Kanda* Zaldy Adam Dh Pasha, S.H.,M.H., *Kanda* Agung Tirtayasa, S.H., *Kanda* Al-Kahfi R. Lidda, S.Pt., *Kanda* Muhajir Habibie, S.Kom., *Kanda* Fauransyah Rosyiddin, S.Pt., *Kanda* Muh. Aksan, S.Pt., *Kanda* Ardyatma Arifin, S.E., *Kanda* Muh. Nurfajrin, S.Pt., *Kanda* Arfah Mappaerang, S.H., *Kanda* Irfan Idham, S.H., *Kanda* Sayyid Muhammad Faldy, *Kanda*

Muhammad Rizal Rustam, *Kanda* Al Kadry Nur, *Kanda* Muhammad Irwan, S.H., *Kanda* Andi Emil Fitrah Ramadhani, S.Ag., *Kanda* Muhammad Irfan, S.Sos., *Kanda* Muhammad Febriansyah Hakim, *Kanda* Suabdi Haswar, *Kanda* Afdhan Adiareski, S.H., *Kanda* Mursidin, S.H., *Kanda* Muhammad Fauzy Khalifah, S.H., *Kanda* Sri Amlinawaty, S.H., *Kanda* Rianthi Nazhifa Zahra, S.E., *Kanda* Nurul Fadhillah Fasiun, S.H., *Kak* Nurul Latifa, S.T., *Kanda* Aprilia Ramadhani, S.H., *Kanda* Andi Risfah, S.H., *Kanda* Mujahiddah, S.H., *Kanda* Fatmawati Nur, S.H., Muhammad Firmansyah, Wiryawan Batara Kencana, Adhe Dwi Putra, Rusdin Eka Putra, Muh. Hasby, Guterez, Ilham Aziz, Imam Taufiq, Arfan Ardin, Ali Rahman, Muh. Natsir Bachtiar, Fahmi Mirza, Muh. Yudha Sudawan, Muh. Khalid Hamka, Akmal Firdaus, Ipul, Muh. Fitriady, Irtanto Hadi Saputra, Ahmad Hasnan, Billah Yuhadian, Dyo Diantara, Aka Akbar Tenri Tata, Syarif Sadam Rivanie Parawansa, Abdillah Zikri N., Suwahyu Ash-Suyuti, Azrina Darwis, Nur Rahma Yunus, Khaerunisa, Andi Dewi Sartika, Mariani Tamma, Andi Djuari Iskandar, Nurul Hani Pertiwi, Andi Dewi Carla Pertiwi, Wahdaniyah Ali, Andi Sulastri, Andi Sahapadlia. Terus-terang, penulis berhutang budi kepada mereka yang telah memperkenalkan konsep Cinta dan Pluralisme. Pemikiran dan cara pandang penulis dalam melihat serta memaknai pelbagai persoalan sosial, logika, filsafat, agama dan hukum sangat dipengaruhi oleh pemikiran mereka. Empat tahun berinteraksi dengan mereka, sangat membuka cakrawala

penulis. Lebih dari itu, betapa uraian kuliah yang penulis cermati di ruang kuliah dan ruang sosial serta percikan pemikiran mereka semua, sangat mendorong penulis untuk belajar lebih giat lagi.

12. Rekan-rekan LK II Intermediete Training Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sidrap; Faizal, Zul Bhona, Hayatullah Hs, Muh. Gazali, Muh. Aziz, A. Median Yasnawi, Anto Industri, Bhio Nur Nahdi Anwar, Sutra Zahra, Vita Titi Ekawati, Dhyba Fyrda Faradhiba, Fajar Jm, Ilham Nyospol, Kurniawan, Rajab, Subair Mangkoso, Uchy, Zay Husain, terima kasih telah memberikan support selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
13. Rekan-rekan seperjuangan serta senior-senior yang bernaung di International Law Students Associations (ILSA) Chapter Hasanuddin University; Hadasa K.S. Belo, S.H., Wardani Rizkianti, S.H., Kartiny Susanty, S.H., Noor Almy, S.H., Muh. Ashar, S.H., Rai Hasny Ltc, S.H., Vika Rosaningrum, S.H., Mishara M. Hanafi, S.H., Kaddarudin Al-Anshari, S.H.,DFM., Dewi Mienar, S.H., Putri Candra Ayu, S.H., Ishemat Soeria Alam, S.H., Firmansyah Bachtiar, S.H., Andy Muh. Zudjudi M., M. Reza Lensa Sudirman, Priandaru Silooy, Muhammad Khaerul Qadar, Randy Rinaldy, S.H., Faudzan Farhana, S.H., Jane A. Achmad, Devyta, S.H., Minarty, S.H., Ackham B., Aswin Bahar, Alwin Hajaning, Rininta Indah, Khandyta Wijaya, Zulkarnaen Hamka, Andi Syaiful Cibu, S.H., Fadhiyatul M. Ulva, Prawidi Wisanggeni, Afrizal Fahrul Jaya, Marsha Revita Voll, A. Pertiwi Fajri, Sagita Widyasari, Muharliz, Raisa Natasha,

Farizah, Adinda Faradina, Rafika Ramli, Iona Hiroshi Yuki Rombot, Riyad Febrian Anwar, Ulfa, Zulkifli Muchtar, Sudarwin, dan seluruh keluarga besar Hukum Internasional yang telah banyak membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

14. Rekan-rekan seperjuangan kelas kokur UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI); Andi Santri Syamsuri, S.H., Indriani Darwis, Wahyudin Opu, Sri Rahayu, Sitti Mashita Tualeka, S.H., Baharuddin, Fandy Jayapura, Firda Amelia, Musawir Arsyad, Andi Kurniati, Okky Nur Irmanita, Muh. Rizka Yunus, Megawati S. Iin, Sukma Indrajati, Arif Ungu Jempol Sejati, Chua Beroncong Protol, Ika Karlina, Ummu Kalstum, Monica Mahardi, Florint, terima kasih atas bimbingan selama menjadi anggota kokur UKM LP2KI.
15. Rekan-rekan aktivis mahasiswa ketika penulis terlibat sebagai anggota di Dewan Perwakilam Mahasiswa (DPM) Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Muh. Solihin S.H., Mansur, S.H., Alvinareza C.A.G., Fadhillah Elivira Suyuti, S.H., Budiamin Prasetya Fantadianank, Dede Arwiansyah, S,H., Arwan Arsyad, William L. Liamata, S.H., dan seluruh aktivis Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mulai dari angkatan Saksi 2004, Delik 2005, Eksaminasi 2006, Ekstradisi & Legalitas 2007, Notaris 2008, Doktrin 2009, Legitimasi 2010 terima kasih telah menjadi sparing partner sehingga penulis memahami segala kekurangan dalam diri penulis.

16. Keluarga Berantakan Kelapa Gading Permai KKN Profesi Hukum Posko Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, yang telah membuat kegiatan KKN menjadi lebih menyenangkan.
17. *Pak* Iman Prarahadian Havid, M.A., *Pak* Ade Padmo Sarwono, *Pak* Heru Subodo, *Pak* M.I Derry Aman, S.E., *Mas* Ramzy Kasri, *Mas* Arsy Dwinugra Firdausy, S.Sos., *Mbak* Starlet Y.K., *Mas* John Romy Purba, S.Sos., *Mbak* Ni Nengah Yuniariasti, *Mas* Ernesto Simanungkalit, S.H., L.LM. *Pak* Asep, S.H. dan Seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementrian Luar Negeri.
18. Keluarga Besar At-taufiqers Duaribusatu khususnya Arif Nindito, S.E., B.Ec., Muhammad Aziz, Muh. Fachri Al-Hamid, S.T., Hafiyyan Hakim, Ummi Zara, Tamira Raissa, S.E., Agill Agassi, S.ked., Bintang Adi Nugroho, Dwinanto., S.T., Rizka Amelia Chandra, S.Sos., terima kasih atas segala dukungan dan doa nya yang menguatkan diri penulis selama merantau di Makassar.
19. Keluarga Besar Kantin & Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Sanny dan Keluarga, Bude dan Pakde Bakso, terima kasih telah menjadikan Sanny Caffe sebagai tempat tongkrongan yang amat sangat nyaman bagi penulis ketika menanti jeda perkuliahan maupun saat membolos. Bu Joice dan Bu Ros terima kasih telah membiarkan penulis mengacak-ngacak dan membuat kegaduhan di perpustakaan selama penulis berkuliah.
20. Mr. Miftah Fauzan, dan seluruh teman-teman di Global English Daeng Tata, terima kasih banyak telah menjadi teman berlatih dan

belajar bahasa Inggris untuk mengejar cita-cita untuk *go abroad*. Kritikan dan masukan serta arahan yang tiada hentinya telah banyak membantu dalam mengantarkan penulis dalam melewati prosesi perkuliahan dan meningkatkan basic skill penulis di bidang verbal. The English Course You Can Trust….!!

21. *The last but not least*, Nurul Wahida, kekasih penulis; tiada kata dan apapun juga yang bisa diungkapkan untuk merepresentasikan seberapa besar dan penting peranannya bagi penulis terutama atas bantuan dan dukungan dalam pembuatan proposal seminar judul hingga seminar hasil, sehingga sampai hari ini penulis masih mampu untuk terus berusaha dan berusaha dalam mewujudkan cita-cita. Terimakasih untuk tetap bersabar dan menanti segalanya menjadi kenyataan.
22. Semua pihak yang mustahil penulis sebutkan satu per satu, yang telah berjasa kepada penulis. Kiranya Allah SWT membalas kebaikan mereka dan Nabi Muhammad SAWW memberikan syafaatnya.

Serangkaian rasa syukur dan ucapan terima kasih di atas, rasanya akan lebih sempurna lagi jika penulis kembali menyadarkan diri bahwa hanya dengan perencanaan, kerja keras, dan do'a yang sungguh-sungguhlah – apa yang kita kehendaki dapat terwujud secara nyata. Penulis kebetulan teringat dengan sebuah dongeng (mimpi) untuk hidup lebih baik dari masa lalu. Sementara, kenyataan yang hadir di depan mata terkadang begitu keras, pahit, dan kejam. Hidup itu sungguh dinamis.

Namun, api semangat untuk memahami kehidupan ini dengan lebih dewasa – harus senantiasa dikobarkan. Hanya dengan kesabaran dan tawakkal kita mampu untuk mengurangi beban berat yang tengah dipikul. Kini, betapa sebagian dari dongeng (mimpi) dan kenyataan itu telah menjadi satu, dan dengan segala keterbatasan, hanya kepada Allah SWT – penulis berserah diri.

Barang siapa yang terlalu bangga akan kesuksesan masa lalu – dengan serta-merta mengabaikan pihak lain yang kini mungkin telah mengalami lompatan jauh di depannya – agaknya telah disadarkan oleh kian kompetitifnya zaman ini. Lebih dari itu, barang siapa yang masih kurang yakin akan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan, terutama di era sekarang, tampaknya masih harus menunggu waktu manakala malapetaka datang mendekap mereka, dan mereka digilas habis oleh roda perubahan zaman. Tantangan kian berat. Namun, hanya dengan pemahaman Tauhid, perangkat ilmu pengetahuan serta berpijak pada landasan dan kerangka berfikir yang ilmiah dan filosofislah kita bisa berkompetisi dalam pusaran arus besar globalisasi dan lingkungan yang terus berubah. Dan hingga kini, penulis masih meyakininya.

Semoga skripsi yang amat sederhana itu membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama kajian tentang *hukum internasional* dan *Hubungan Internasional*. Semoga karya yang sederhana itu menjadi awal dari produktivitas pribadi penulis di masa-masa mendatang agar lebih dewasa dalam bersikap, termasuk kewajiban

berbakti kepada agama, bangsa, negara serta keluarga penulis tercinta. Amin.

Sebagai orang Bugis yang pada umumnya sarat *siri na pacce*, dengan segala kerendahan hati – penulis meminta maaf dan terima kasih jika penulis dipersepsikan secara salah/keliru/tidak pada tempatnya dalam bersikap serta membawakan diri selama ini.

Orang bijak mengatakan bahwa bermimpilah, maka Tuhan mu akan memeluk mimpi-mimpi itu. Penulis sendiri masih dan tetap ingin terus belajar dan berusaha untuk mengejar mimpi. Dengan optimis menatap masa depan yang lebih baik, penulis tutup dengan: ***Yakin Usaha Sampai.***

Wasalamu alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Makassar, April 2011

Manggolo Yudho Perdana
Penulis

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN *Association of South-East Asian Nations*

ACC *ASEAN Coordinating Council*

ACC *ASEAN Community Councils*

ACCT *ASEAN Convention on Counter Terrorism*

AECC *ASEAN Economic Community Council*

APSCC *ASEAN Political-Security Community Council*

ARF ASEAN *Regional Forum*

ASCC *ASEAN Socio-Cultural Community Council*

ASC *ASEAN Standing Committee*

AMM *ASEAN Ministerial Meeting*

ALAWMM *ASEAN Law Ministers Meeting*

IGOs *International Governmental Organizations*

INGOs *International non-Govermental Organizations*

KTT Konfrensi Tingkat Tinggi

MLAT *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*

MNCs *Multi National Corporations*

NATO *North Atlantic Treaty Organizations*

SBMM *Sectoral Bodies Ministerial Meeting*

SEATO *South East AsiaTreaty Organizations*

SOM *Senior Official Meeting*

TOC *Transnational Organized Crime*

ZOPFAN *Zone of Peace, Freedom and Neutrality*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

LEMBAR PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR SINGKATAN xiv

DAFTAR ISI xx

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Hubungan Internasional 9

1. Pengertian Hubungan Internasional 9
2. Subyek dalam Hubungan Internasional 12
3. Paradigma dalam Hubungan Internasional 14
4. Hubungan Internasional Pasca-Perang Dingin 18

B. Politik Luar Negeri 20

1. Pengertian Politik Luar Negeri 20
2. Tujuan Politik Luar Negeri 21
3. Perumusan Politik Luar Negeri 22
4. Politik Luar Negeri Indonesia 24
5. Pengertian Geopolitik 27

C. Batas Kekuatan Nasional 29

1. Kekuatan Nasional Indonesia 29
2. Pola Utama Perimbangan Kekuasaan 31

D. Regionalisasi dan Intergrasi 38

1. Konsep Regionalisme 38
2. Konsep Intergrasi 41
E. Regionalisasi Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) 44
1. Prinsip dan Tujuan Pembentukan ASEAN 45
2. Keanggotaan ASEAN 47
3. Struktur ASEAN 48
4. Dasar Hukum Pembentukan ASEAN 49
5. Kerjasama ASEAN dalam Bidang Politik 50
6. Kerjasama ASEAN dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan 52
7. Kerjasama ASEAN dalam Bidang Hukum 53
BAB III METODE PENELITIAN 57
A. Lokasi Penelitian 57
B. Jenis dan Sumber Data 57
C. Teknik Pengumpulan Data 59
D. Teknik Analisis Data 59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 60
A. Implikasi Unipolaritas Geopolitik Internasional Terhadap Stabilitas Hubungan Internasional Indonesia 60
B. Manfaat Apa Yang Didapat Indonesia Sebagai Negara Anggota Organisasi Regional Asia Tenggara (Asean) Dalam Menjaga Perdamaian Dan Stabilitas Hubungan Internasional Indonesia 77
BAB V PENUTUP 94
A. Kesimpulan 94
B. Saran 95
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional, adalah cabang dari ilmu politik, merupakan suatu studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam sistem internasional, termasuk peran negara-negara, organisasi-organisasi antarpemerintah, organisasi-organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan-perusahaan multinasional.[1]

Hubungan internasional berkaitan dengan politik, sosial, budaya, ekonomi dan interaksi lainya di antara subyek-subyek negara dan subyek-subyek non-negara. Hubungan internasional juga mengkaji tentang politik internasional walaupun istilah seperti hubungan internasional, politik dunia, dan politik internasional memiliki arti yang sama.[2] Sementara dalam perspektif yang lain justru ingin memperkecil ruang lingkup ilmu hubungan internasional dengan menekankan pada aspek politik dari hubungan antarnegara, yang dapat dipelajari melalui politik luar negeri negara-negara yang bersangkutan. Secara khusus **Hoffman**[3] menyatakan bahwa ilmu hubungan internasional sebagai subjek akademis terutama memperhatikan hubungan politik antar negara.

---

[1] Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,* Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal. 1

[2] *Ibid* hal.4.

[3] Stanley Hoffman, *Power Politics,* Prentice Hall, London, 1964, hal.8.

Perang Dingin ditandai dengan pembagian blok antara Blok Timur pimpinan Uni Soviet yang berhaluan komunis dengan blok Barat pimpinan Amerika Serikat yang menganut kapitalisme. Hubungan internasional pada kurun waktu sejak berakhirnya Perang Dunia II tak lepas dari kerangka Perang Dingin.

Dominasi Uni Soviet dan Amerika Serikat terhadap para sekutunya menyebabkan hubungan internasional sangat dipengaruhi kepentingan kedua negara adidaya. Tidak mengherankan kemudian muncul blok-blok aliansi yang lebih didasarkan pada persamaan ideologis. Hampir semua langkah diplomatik dipengaruhi oleh tema-tema ideologis yang kemudian dilengkapi dengan perangkat militer. Pertentangan sistem hidup komunis dan liberal ini demikian intensifnya sehingga pada akhirnya perlombaan senjata tak dapat dihindarkan lagi.

Adapun pola dalam melakukan hubungan politik antar negara atau interaksi antar negara-negara berdaulat seiring dengan berjalannya waktu mengalami perubahan-perubahan. Pada tahun 1980-an pola hubungan internasional masih bersifat *state centric* dalam artian masih bipolar.[4] Di mana suatu negara dalam melakukan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kebijakan politik luar negeri tersebut cenderung berjalan searah dengan pola kebijakan politik yang diambil oleh sekutunya.

[4] Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani *Op.cit*, Hal.3.

Menurut **Juwono Sudarsono**, secara resmi apa yang dikenal sebagai Perang Dingin berakhir pada kurun waktu 1989-1990 dengan runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989 serta menyatunya Jerman Barat dan Timur pada 3 Oktober 1990. Perkembangan itu disusul dengan bubarnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991 bersamaan dengan mundurnya Mikhail Gorbachev sebagai kepala negara. Setelah berakhirnya Perang Dingin yang ditandai antara lain dengan runtuhnya Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet, sehingga Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya.

Kemudian pada tahun 1990-an runtuhnya Uni Soviet (sebagai negara komunis utama) telah memunculkan corak pola hubungan internasional yang khas.[5] Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri semangat sistem internasional yang *bipolar* dan berubah pada *unipolar* atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia ini.

Implikasi dengan berakhirnya salah satu episode dalam hubungan antar bangsa berupa Perang Dingin, melahirkan realitas baru dalam perhatian negara besar dan negara yang bekas komunis. Isu-isu utama yang menjadi pilar hubungan internasionalpun mengalami pergeseran. Meskipun isu lama yang menyangkut keamanan nasional dan

[5] *Ibid,* hal.5

pertentangan masih tetap berlanjut namun tak dipungkiri adanya perhatian baru dalam tata hubungan antar negara dan antar bangsa.

Pasca-Perang Dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih fokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) kepada isu-isu *low politics* (misalnya, hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme) yang dianggap sudah sama pentingnya dengan isu *high politics.*[6]

Dengan kata lain, dapat pula dikatakan bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin dengan ditandai oleh keruntuhan rezim komunis Uni Soviet, maka dunia dipengaruhi oleh harapan-harapan akan terciptanya tata dunia baru yang lebih damai, aman dan sejahtera. Saat ini persaingan ideologi dan kekuatan militer dapat diturunkan dari skala prioritasnya yang utama, dan masyarakat internasional sepertinya ingin berkonsentrasi pada masalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan di bidang ekonomi.[7]

Jika selama masa Perang Dingin *bargaining position* suatu negara dapat ditunjang oleh keterlibatanya dalam suatu blok keamanan semisal blok pertahanan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan pesaingnya yaitu Pakta Warsawa, akibat dari runtuhnya rezim komunis Uni Soviet maka sekarang posisi tawar menawar tersebut bisa didapat dengan cara melibatkan diri pada suatu blok perdagangan atau dengan melibatkan diri kedalam aliansi regional kawasan.

---

[6] Charles w, Kegley dan Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trends and Transformation,* St. Martin's Press, New York, 1997, hal. 4-6

[7] Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani *Loc.cit,* Hal.5

Realitasnya dalam praktik hubungan internasional baik di masa Perang Dingin maupun pasca-Perang Dingin, kecenderungan negara-negara dalam melakukan hubungan antar negara dipengaruhi oleh adanya blok-blok negara atau polarisasi negara. Dalam perkembangan polarisasi di saat Perang Dingin kecenderungan pola yang ada ialah polarisasi geopolitik, lalu pasca-Perang Dingin kecenderungan pola yang tumbuh di antara negara-negara yang melakukan hubungan antar negara ialah polarisasi geo-ekonomi. Namun yang menjadi kesamaan dalam perkembangan laju hubungan internasional tersebut adalah kecenderungan negara-negara untuk menuju kepada suatu blok atau dengan kata lain baik dalam sektor ekonomi maupun politik dan keamanan, negara-negara dalam menjaga stabilitasnya di segala bidang cenderung memilih untuk melakukan regionalisasi atau penyatuan wilayah baik dalam arti geografi, ekonomi, politik, dan ideologi.

Regionalisasi dalam artian geografi, politik, dan ekonomi tercermin dengan adanya fenomena di Asia Tenggara dengan prakarsa *Association of South-East Asian Nations* (ASEAN) mengukuhkan zona bebas nuklir termasuk salah satu ciri dimana keamanan regional penting bagi kawasan ini, serta dengan adanya deklarasi ASEAN.

Deklarasi ASEAN menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari Asosiasi adalah sebagai berikut[8]:

---

[8] Tentang ASEAN, http://www.deplu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=6&l=id diakses pada 13 November 2010

1) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di kawasan;
2) untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bentuk lain dari regionalisasi dalam artian politik adalah hubungan antara kelompok regional dengan *single power*. Dalam banyak kasus hubungan ini, *single power* kerapkali memainkan peranan dominan dalam kerjasama tersebut. Hal ini misalnya terlihat dengan cukup jelas mengenai peranan AS dengan beberapa negara Uni Eropa. Kasus perbedaan pandangan antara Jerman, Perancis, dan beberapa negara di Uni Eropa lainya mengenai Irak berhadapan dengan AS, Inggris dan Spanyol, adalah salah satu contoh konkret mengenai dominasi AS di Eropa.[9]

Dari beberapa pemaparan di atas, terlihat bahwa regionalisasi maupun polarisasi dari segi politik, sosial, budaya, ekonomi dan geografi merupakan sebuah fenomena dalam hubungan internasional yang terus berkembang dan tentunya memiliki implikasi terhadap stabilitas hubungan internasional itu sendiri. Secara empiris, dinamika perkembangan dan eksistensi regionalisasi kawasan ASEAN dan Uni Eropa adalah sebagai penyeimbang unipolarisasi pasca-perang dingin tersebut dalam pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia pada khususnya dan stabilitas hubungan internasional Indonesia pada umumnya, selaku negara yang berada dalam pergaulan internasional diantara kedua regionalisasi dan polarisasi kawasan tersebut.

---

[9] Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani *Loc.cit,* Hal.110

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, untuk memfokuskan penulisan skripsi ini maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah implikasi unipolaritas geopolitik Internasional terhadap stabilitas hubungan internasional Indonesia?
2. Manfaat apa yang didapat Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Regional Asia Tenggara (ASEAN) dalam menjaga perdamaian dan stabilitas hubungan internasional Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah implikasi unipolaritas geopolitik Internasional terhadap stabilitas hubungan internasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui manfaat apa yang didapat Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Regional Asia Tenggara (ASEAN) dalam menjaga perdamaian dan stabilitas hubungan internasional Indonesia.

b. Kegunaan Penulisan:

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu referensi masalah hubungan internasional dan dan geopolitik internasional di Indonesia yang dapat

digunakan bagi peneliti-peneliti mengenai hubungan internasional dan geopolitik internasional selanjutnya.

2. Sebagai sebuah persembahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
3. Sebagai sebuah *pilot project* untuk menjadikan pengakajian hubungan internasional sebagai sebuah kajian fundamental terhadap hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
5. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi dosen, mahasiswa, maupun umum.
6. Referensi bagi perpustakaan Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Hukum.
7. Dan juga tulisan ini sebagai persembahan kepada kemanusiaan yang kemudian ditujukan untuk kemasalahatan umat manusia.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Internasional

1. Pengertian Hubungan Internasional

Seperti halnya sebuah kata pada umumnya, hubungan internasional dapat didefinisikan secara etimologis dan terminologi. Secara etimologis, hubungan internasional berasal dari dua kata yaitu hubungan dan internasional. Hubungan adalah sebuah interaksi yang terjalin satu sama lain, dan internasional adalah segala sesuatu yang terjadi melintasi batas negara.

Sedangkan, secara terminologi, hubungan internasional adalah sebuah interaksi yang terjadi melintasi batas negara yang dilakukan oleh subyek-subyek tertentu dengan segala kepentingannya dan ada sejumlah kebijakan yang berlaku dalam mengatur hubungan tersebut. Sebagai salah satu bagian dari disiplin ilmu, hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari fenomena hubungan atau interaksi yang melewati batas teritori negara. Ilmu hubungan internasional tidak jauh dari ilmu politik. Di dalam studi hubungan internasional terdapat aspek politik, ekonomi, hukum, sosial-budaya, geografi, dan beberapa studi sosial lainnya. Sehingga, dapat dianalogikan studi hubungan internasional sebagai sawah yang luas tetapi tidak dalam.

Hubungan internasional mempelajari segala sesuatunya secara luas dengan segala aspek walaupun tidak mengkaji secara dalam,

karena studi hubungan internasional tidak berpatokan hanya pada satu aspek politik saja, atau ekonomi saja, atau hukum saja.

Dalam perspektif yang lain hubungan Internasional, didefinisikan cabang dari ilmu politik, merupakan suatu studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam sistem internasional, termasuk peran negara-negara, organisasi-organisasi antarpemerintah, organisasi-organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan-perusahaan multinasional.[10]

Hubungan internasional berkaitan dengan politik, sosial, budaya, ekonomi dan interaksi lainya di antara subyek-subyek negara dan subyek-subyek non-negara. Hubungan internasional juga mengkaji tentang politik internasional walaupun istilah seperti hubungan Internasional, politik dunia, dan politik internasional memiliki arti yang sama.[11]

Sementara dalam perspektif yang lain justru ingin memperkecil ruang lingkup ilmu hubungan internasional dengan menekankan pada aspek politik dari hubungan antarnegara, yang dapat dipelajari melalui politik luar negeri negara-negara yang bersangkutan. Secara khusus **Hoffman**[12] menyatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional sebagai

---

[10] Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,* Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal. 2

[11] *Ibid* hal. 4

[12] Stanley Hoffman, *Power Politics,* Prentice Hall, London, 1964, hal.8

subjek akademis terutama memperhatikan hubungan politik antarnegara.

Pada awalnya, para pemikir yang tertarik pada masalah-masalah internasional, memfokuskan kajiannya hanya pada interaksi antar negara dan fenomena-fenomena militer (keamanan). Sebagai contoh adalah Thucydides yang mempelajari Perang Peloponnesia antara Sparta dan Athena. Di dalam kajiannya tersebut, Thucydides berusaha untuk memahami sebab-sebab terjadinya Perang Peloponnesia.

Namun saat ini, hubungan internasional tidak lagi hanya membatasi diri pada kajian interaksi antar negara dan fenomena militer lagi. hubungan internasional telah berkembang jauh dengan memasukan beragam isu dan subyek-subyek selain negara, ke dalam kajiannya. **Karl Deutsch** membagi 12 ruang lingkup hubungan internasional, yaitu:[13]

1) Bangsa dan dunia
2) Proses transnasional dan interdependensi internasional
3) Perang dan damai
4) Kekuatan dan kelemahan
5) Politik Internasional dan masyarakat internasional
6) Kependudukan versus pangan, sumber daya alam dan lingkungan
7) Kemakmuran dan kemiskinan
8) Kebebasan dan penindasan
9) Persepsi dan ilusi
10) Aktivitas dan apati
11) Revolusi dan stabilitas
12) Identitas dan transformasi.

[13] Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta 1994, hal.90

Dengan ruang lingkup yang demikian beragam, isu-isu di dalam hubungan internasional pun ikut berkembang. Secara garis besar isu di dalam hubungan internasional terbagi dua: pertama, *high politics issues*, yaitu isu-isu yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup negara (*state's survival*). Di dalam kategori ini terdapat isu politik, keamanan dan ekonomi. Kedua, *low politics issues*. Di dalam kategori ini terdapat isu-isu seperti: perdagangan obat-obatan terlarang (*drugs trafficking*), peredaran senjata gelap (*arms trafficking*), penyelundupan manusia (*human trafficking*), pemanasan global, kejahatan terorganisir lintas-batas negara (*transnational organized crime*) dan lain-lain.

2. Subyek dalam Hubungan Internasional

Subyek yang dimaksud dalam hubungan internasional adalah negara dan non-negara. negara dikatakan sebagai subyek utama yang dapat melakukan interaksi secara formal dimana negara yang mempunyai sistem politik luar negeri memiliki kepentingan nasional (*national interest*) untuk diwujudkan, dan peran politik luar negeri tersebutlah yang memudahkan terciptanya sebuah hubungan internasional. Dalam hal ini, hubungan internasional hanya diperankan oleh seorang diplomat dan wakil negara dalam pemerintahan sebagai subyek utama yang akan membina sebuah kerjasama dengan negara lain. Di samping negara, subyek lainnya adalah non-negara yang antara lain adalah *Multi National Corporations (MNCs), International Governmental Organizations (IGOs), International non-Govermental*

Organizations (INGOs) dan bahkan kelompok-kelompok individu lintas batas negara seperti kelompok teroris internasional dan *Transnational Organized Crime (TOC).*[14]

Sebagai ilustrasi pada tahun 1909 hanya tercatat 37 IGOs dan 176 NGOs, pada dekade 1960, jumlah IGOs meningkat menjadi 154 dan NGOs meningkat menjadi sebanyak 1255. Sementara di awal tahun 2003 jumlah subyek non-negara ini mengalami peningkatan menjadi 243 IGOs dan 28.775 NGOs.[15] Kita dapat menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan yang sangat tajam dari sisi kuantitas subyek non-negara.

Di sisi lain, interaksi yang dihasilkan oleh IGOs dan NGOs juga semakin rumit karena keterkaitan mereka dalam beragam isu yang begitu luas seperti perdangan internasional, pertahanan, pelucutan sejata, perdamaian dunia, pembangunan sosial budaya, kesehatan, pengungsi, lingkungan hidup, pariwisata, perburuhan dan juga kampanye terhadap penghapusan perdagangan narkotika.

Selain itu, subyek non-negara lainya yang juga perlu diperhatikan dengan seksama dalam hubungan internasional adalah keberadaan *Transnational Organized Crime* (TOC). Subyek ini secara luas dapat didefinisikan sebagai "*Organized crime consist of organizations that have durability, hierarchy, and involvement in a*

---

[14] Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Op.cit,* Hal.11

[15] Charles W. Kegley dan Eugene Wittkopf, *World Politics: Trends and Transformation,* Wadswort, California, 2004, hal.137

multiplicity of criminal activities".[16] Selain itu karakteristik utama organisasi ini adalah wilayah operasinya yang bersifat transnational.[17]

Dalam konteks ini, paradigma pluralisme menyatakan bahwa subyek-subyek dalam hubungan internasional tidak saja terdiri dari subyek negara melainkan pula subyek non-negara termasuk pula didalamnya masyarakat. Aktivitas hubungan transnasional dari berbagai subyek non-negara ini kemudian memunculkan konsep *international society* yang pada intinya merupakan interaksi antarindividu atau kelompok yang melewati batas-batas negara. Namun demikian masih banyak teoretis hubungan internasional yang mengakui bahwa subyek negara masih menjadi subyek yang sangat dominan dalam hubungan internasional sebagaimana dinyatakan **Charles Beitz** bahwa "*nation-state are the most important actors for understanding international relations*".[18]

3. Paradigma dalam Hubungan Internasional

Paradigma merupakan pijakan dasar untuk menjelaskan fenomena-fenomena, masalah-masalah hubungan internasional atau politik tertentu melalui suatu sistem kriteria, standar-standar, prosedur-prosedur, dan seleksi fakta permasalahan yang relevan.[19]

---

[16] Peter Reuter, *Disorganized Crime: Illegal Markets and The Mafia*, MIT Press, Cambridge, 1983, hal. 75

[17] R.T Naylor, *Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance and the Underworld Economy*, Cornell University Press, Ithaca, 2002, hal.14-18

[18] Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Op.cit,* Hal.12

[19] *Ibid,* Hal.24

a) Paradigma Realisme

Negara adalah subyek utama dalam hubugan internasional yang bersifat rasional, yang bisa memperhitungkan *cost and benefit* dari tindakannya demi kepentingan keamanan nasional sehingga fokus dari penganut realis adalah *struggle of power* atau *realpolitic*. Kemudian realisme berpendapat bahwa kerjasama dibangun hanya untuk kepentingan jangka pendek. Ketertiban dan stabilitas hubungan internasional hanya akan dicapai melalui distribusi kekuatan.[20]

Dalam politik luar negeri suatu negara, paham realis ini dapat dilihat dari pelaksanaan politik luar negeri yang bersifat unilateralis, nasionalis, dengan strategi penangkalan, perimbangan kekuasaan (*balance of power theory*), dan aliansi-aliansi pertahanan (*defence alliances*).

Adapun tokoh-tokohnya ialah: Machavelli, Hegel, Hans Morgenthau, E.H. Car, Kenneth N. Waltz, Reagan, George W. Bush, Jossep Stalin.

b) Paradigma Idealisme

Paham idealis bersifat normatif, apa yang seharusnya terjadi, pentingnya peranan prinsip-prinsip, hukum dan organisasi internasional, dan adanya pengaruh opini publik yang suka damai, bercita-cita membentuk *world government.* Dengan kata lain, negara-

[20] *Ibid,* Hal.25

negara saling berkerjasama dalam berbagai organisasi internasional untuk mencapai tujuan-tujuan global dan kemanusiaan.

Dalam politik luar negeri satu negara, paham idealis ini dapat dilihat dari pelaksanaan politik luar negeri yang bersifat multilateralis, internasionalis, liberalisme, humanis, dengan strategi utama diplomasi yang mengedepankan legalitas, moralitas, dan demokrasi melalui perundingan untuk mencapai kompromi dan harmonisasi.

Adapun tokoh-tokohnya ialah: Immanuel Kant, Woordrow Wilson, Betrand Russel, Carter, Bill Clinton, Al Gore, Mikail Gorbachev.

c) Paradigma Pluralisme

Pluralis merupakan adalah satu perspektif yang berkembang pesat. Kaum pluralis memandang hubungan internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tetapi juga merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai subyek utama dan subyek tunggal.

Empat asumsi paradigma pluralisme adalah:[21]

1) Subyek non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintahan maupun non-pemerinahan, MNCs, kelompok ataupun individu.
2) Negara bukanlah subyek tunggal dan tidak menjadikan negara sebagai satu-satunya subyek.
3) Negara bukan subyek rasional. Dalam kenyataanya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi, dan kompromi antar subyek di dalam negara.

[21] *Ibid,* Hal.26

4) Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaku pada *power* atau *national security*, tapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Bagi kaum pluralis, interdependensi[22] memiliki implikasi yang baik terhadap subyek-subyek hubungan internasional. Kaum pluralis melihat bahwa kesempatan untuk membangun sebuah hubungan baik antar unit-unit yang interdependen sangat bagus. Mengelola hubungan interdependen meliputi pembuatan seperangkat aturan, prosedur, dan institusi yang tersosiasi atau organiasasi internasional untuk mengatur interaksi dalam area-area isu tertentu.[23]

d) Paradigma Liberalisme

Para penganut liberalisme berpendapat bahwa negara bukan satu-satunya subyek dalam hubungan internasional. Selain negara terdapat juga subyek non-negara yang mempunyai pengaruh dan legitimasi yang independen dari negara. Istilah lain untuk paham ini yaitu *Liberal internationalism, Liberal institutionalism,* dan *Transnationalism.*

Kemudian sifat dasar sistem internasionalnya adalah anarki yang tertib dan hirarki yang didukung oleh aturan-aturan dan hukum internasional. Sifat dasar interaksi antar negara yakni kompetitif dan kadang-kadang konflik tetapi lebih sering bersifat kerjasama pada

[22] Ketergantungan satu sama lain.

[23] Paul R. Votti dan Mark V. Kauppi, *International Relation Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond.* Allyn & Bacon, New York, 1990, Hal.244

bidang ekonomi dan isu-isu lainya.[24] Tokohnya adalah Jerman, Inggris, Amerika Serikat.

e) Paradigma Merkantilisme

Paham merkantilisme berpandangan bahwa dalam hubungan internasional negara-negara saling bersaing untuk memenuhi kepentingan ekonominya masing-masing. Istilah lain yang dikenal untuk paham ini seperti nasionalisme ekonomi, ekonomi-politik, proteksionisme. Pendekatan hubungan internasional yang digunakan dalam perspektif ini yakni melalui hubungan bilateral.

Dalam pelaksanaan politik luar negeri satu negara, paham merkantilis kerap memunculkan kebijaka-kebijakan yang berkenaan dengan proteksi, regulasi, subsidi, dan pengenaan pajak yang kesemuanya itu diarahkan untuk menghasilkan keuntungan dan surplus bagi ekonomi negara tersebut. Tokohnya adalah Jepang, Republik Rakyat Cina, dan Amerika Serikat.

4. Hubungan Internasional Pasca Perang Dingin

Perang Dingin ditandai dengan pembagian blok antara Blok Timur pimpinan Uni Soviet yang berhaluan komunis dengan blok Barat pimpinan Amerika Serikat yang menganut kapitalisme. Hubungan internasional pada kurun waktu sejak berakhirnya Perang Dunia II tak lepas dari kerangka Perang Dingin.

---

[24] Bruce Ruset, Harvey Star, dan David Kustella, *World Politics: The Menu for Choice,* Wadworth, Belmont, 2004, Hal.28

Dominasi Uni Soviet dan Amerika Serikat terhadap para sekutunya menyebabkan hubungan internasional sangat dipengaruhi kepentingan kedua negara adidaya. Tidak mengherankan kemudian muncul blok-blok aliansi yang lebih didasarkan pada persamaan ideologis. Hampir semua langkah diplomatik dipengaruhi oleh tema-tema ideologis yang kemudian dilengkapi dengan perangkat militer.

Perang Dingin berakhir pada kurun waktu 1989-1990 dengan runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989 serta menyatunya Jerman Barat dan Timur pada 3 Oktober 1990. Perkembangan itu disusul dengan bubarnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991 bersamaan dengan mundurnya Mikhail Gorbachev sebagai kepala negara. Setelah berakhirnya Perang Dingin yang ditandai antara lain runtuhnya Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya.

Kemudian pada tahun 1990-an runtuhnya Uni Soviet (sebagai negara komunis utama) telah memunculkan corak pola hubungan internasional yang khas.[25] Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri semangat sistem internasional yang *bipolar* dan berubah pada *unipolar* atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia ini.

[25] *Ibid,* hal.5

Dengan berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih fokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) kepada isu-isu *low politics* (misalnya, hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme) yang dianggap sudah sama pentingnya dengan isu *high politics.*[26]

B. Politik Luar Negeri

1. Pengertian Politik Luar Negeri

Interaksi antarnegara dalam paradigma hubungan internasional banyak ditentukan oleh politik luar negeri negara tersebut. Politik luar negeri tersebut merupakan kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negeri. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional negara dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dalam hal tersebut lazimnya disebut kepentingan nasional negaranya. Tujuan tersebut memuat gambaran atas keadaan negara di masa mendatang dan kondisi masa depan yang diinginkan.

Menurut **C.P.F Luhulima** politik luar negeri suatu negara meliputi semua tindakan yang dijalankan oleh penguasa negara untuk mempengaruhi berbagai keadaan dan perkembangan di luar batas-batas yurisdiksinya, sehingga memungkinkan negara itu memperoleh

[26] Charles w, Kegley dan Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trends and Transformation,* St. Martin's Press, New York, 1997, hal. 4-6

keuntungan-keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasionalnya.[27]

Telah menjadi suatu hukum alam bahwa tidak ada suatu negara pun yang mampu bertahan tanpa berhubungan dengan negara lain. Dalam hal ini keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara akan dijadikan alasan dasar bagi pelaksanaan politik luar negeri. Sumber daya nasional yang terbataslah yang menjadi penyebab dilakukannya politik luar negeri. Kepentingan nasional itu sendiri timbul untuk menutupi kekurangan sumber daya itu, yang ternyata hanya bisa diperoleh di luar batas-batas teritorial negaranya.[28]

2. Tujuan Politik Luar Negeri

Kepentingan nasional merupakan *platform* dalam pelaksanaan politik luar negeri. Istilah politik luar negeri menurut **James N Rossenau**, Sebagai sekumpulan orientasi, politik luar negeri merupakan sejumlah cita-cita bangsa yang diarahkan atau yang berhubungan dengan negara lain. Sebagai sejumlah komitmen dimaksudkan adalah mengandung dimensi yang bersifat strategis, artinya sebelum melakukan berbagai tindakan dalam forum internasional maupun member respon terhadap berbagai tindakan dari negara lain maka suatu negara harus memiliki sebuah rencana atau

[27] C.P.F Luhulima, *ASEAN menuju postur baru,* Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1997

[28] Warsito Nugroho, *Konflik Antar Kepentingan Ataukah Peradaban*, Armico, Jakarta, 1998, hal.2

platform yang menjadi acuan seluruh pelaku politik luar negeri suatu negara.[29]

Berdasarkan konsep tersebut maka dalam memberikan batasan tentang kebijakan politik luar negeri, terlebih dahulu harus mengetahui kondisi internal negaranya sebelum mengeluarkan kebijakan politik luar negeri. Sebagai bagian dari politik luar negeri, maka kebijakan luar negeri jika ditinjau dari segi perumusanya maka akan erat kaitannya dengan politik dalam negeri yang didalamnya mencakup proses pengambilan kebijakan yang melibatkan keseluruhan unsur-unsur negara tetapi lebih khusus kepada badan legislatif sebagai perumus kebijakan dan badan eksekutif negara selaku pemerintah dan pelaksana kebijakan tersebut.

3. Perumusan Politik Luar Negeri

Dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara tergantung pada sistem politik dalam negeri di negara tersebut. Tapi secara umum dalam suatu negara, pelaksanaan politik luar negeri melibatkan semua pejabat dan badan administratif dalam suatu pemerintahan yang langsung ataupun tidak langsung turut menyiapkan pembuatan maupun pelaksanaan dari berbagai keputusan yang berkenaan dengan politik luar negeri. Perbedaan sistem pemerintahan disetiap negara dalam pengorganisasianya tidaklah sama tetapi pada

[29] Sufri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*: *Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian Tentang Pelaksanaanya,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hal.78

umumnya disetiap negara memiliki stratifikasi sebagaimana berikut ini:[30]

1) Pimpinan Eksekutif tertinggi; sistem pemerintahan yang dianut, dapat merupakan seorang presiden (misalnya Amerika Serikat, Indonesia, Prancis), Perdana Menteri (misalnya Australia, Malaysia, Singapura).
2) Pejabat Tinggi di Bidang Politik Luar Negeri yang dimaksud disini adalah menteri luar negeri, beserta menteri pertahanan, menteri perdagangan, dan kepala badan intelijen negara.
3) Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan Pemerintahan; yaitu komisi bidang luar negeri dalam parlemen, departemen luar negeri, departemen pertahanan, departemen perdagangan, dan badan intelijen negara.

Dari keseluruhan organisasi pelaksana politik luar negeri, para pimpinan eksekutif tinggi yang berada pada strata pertama berserta ideologi yang dianut sangat berpengaruh penting dalam memberikan arah, bobot serta kerangka dasar bagi kebijakan luar negeri suatu negara.

Dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri keberadaan subyek-subyek non-negara dalam hubungan internasional merupakan mitra bagi subyek negara dan tetap merupakan faktor pertimbangan yang sangat penting dalam memberi konstribusi bagi pembuatan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara. Dengan kata lain, dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan luar negeri masukan atau *input* baik yang berupa dukungan maupun tuntutan yang datang dari subyek non pemerintah yang memiliki kepentingan

[30] Budiono Kusumohamidjojo, *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis*, Jakarta, Bina Cipta, 1987, hal.33

terhadap sebuah keputusan luar negeri sedikit banyak akan melakukan usaha untuk mempengaruhi proses tersebut.

Dari berbagai proses dan variabel yang berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan politik luar negeri maka dapat dijelaskan bahwa rumitnya pengambilan kebijakan politik luar negeri sangat dipengaruhi oleh kompleksitas sistem yang harus diperhatikan sebelum menetapkan suatu kebijakan.

4. Politik Luar Negeri Indonesia

Pada dasarnya politik luar negeri Indonesia senantiasa amat dipengaruhi oleh realitas politik domestik Indonesia. Dilain sisi situasi politik domestik Indonesia juga tidak dapat terlepas dari konstelasi politik global. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif pada era demokrasi liberal tentulah menjadi situasi politik yang menarik untuk dicermati. Pada masa era itu dimana Indonesia masih berupa bayi yang baru terlahir setelah sekian lama dikandung dalam situasi kolonialisme (penjajahan), harus menentukan sikap politik luar negerinya ditengah konstelasi politik global yang terkungkung oleh perang dingin antara blok Barat yang berideologikan liberalis kapitalis di bawah komando Amerika Serikat dan blok Timur yang berideologi Sosialis komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet.

Dalam situasi ini tuntutan terhadap sebuah negara yang baru merdeka seperti Indonesia untuk menentukan sikap dan posisinya dalam kancah politik Global. Secara genius para Founding Fathers kita

mampu menentukan sikap politik luar negeri yaitu Bebas Aktif. Yang menjadi menarik di sini adalah kita tahu bahwa sejarah pergerakan nasional indonesia yang menghantarkan kita pada kemerdekaan tidaklah terlepas dari pertarungan kepentingan kedua blok yang bertikai dalan kancah politik global tersebut untuk saling memperluas hegemoninya.

Sistem pemerintahan di indonesia yang saat itu dapat kita katakan sebagai masa percobaan demokrasi, yang mana semenjak revolusi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, di tandai dengan polarisasi maupun fragmentasi politik di Indonesia yang di tandai dengan menjamurnya partai politik saat itu yang di bentuk oleh elit politik sebagai sarana pengejahwantahan kepantingan politik masing-masing. Bukti yang cukup kuat untk menegaskan situasi ini adalah situasi politik domestik yang tidak stabil dan sering bergantinya pimpinan pemerintah dalam hal ini perdana menteri beserta kabinetnya yang setiap masa kepemimpinannya selalu mengutamakan kepentingan atas ideologi maupun partainya.

Secara teoritis dasar pembentukan politik luar negeri berdasarkan yang diajukan oleh Graham Alison maka proses pembentukan politik luar negeri Indonesia bebas aktif merupakan hasil dari model *Rasional Subyek,* yang mana tokohnya adalah Ir. Muhamad Hatta. Seperti diketahui dalam keterangan sebagai pemerintah tentang politiknya dimuka sidang badan pekerja KNIP di Yogyakarta, yang

diajukannya pada tanggal 2 september 1948. pidatonya yang kemudian diberi judul "*Mendayung Antara Dua Karang*".

Dalam keterangan pemerintah tanggal 2 september 1948 itu Bung Hatta bertanya, "mestikah kita bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro Rusia dan pro Amerika? Apakah kita tak ada pendirian yang lain harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?".

Menurut **Bung Hatta**, pemerintah berpendapat bahwa kebijakan yang diambil jangan sampai menjadikan Indonesia sebagai obyek dalam pertarungan internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subyek yang menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka yang berpandangan politik bebas aktif. ***Bebas,*** artinya menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun juga; ***Aktif,*** artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan seluruh bangsa.

Tampak jelas bahwa ide dasar politik luar negeri bebas aktif yang dikemukakan oleh Hatta sama sekali bukan retorika kosong mengenai kemandirian dan kemerdekaan, akan tetapi dilandasi pemikiran rasional dan bahkan kesadaran penuh akan prinsip-prinsip realisme dalam menghadapi dinamika politik internasional dalam konteks dan ruang waktu yang spesifik. Bahkan Bung Hatta dengan tegas menyatakan, percaya akan diri sendiri dan berjuang atas

kesanggupan kita sendiri tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan daripada pergolakan politik internasional.

Dari sekian penjabaran diatas dapat kita elaborasikan pengertian politik luar Indonesia sebagai berikut.Politik Luar Negeri yang bebas aktif mengandung dua unsur pokok. Pertama, "bebas" biasanya diartikan tidak terlibat dalam aliansi militer atau pakta pertahanan dengan kekuatan-kekuatan luar yang merupakan cirri Perang Dingin. Dalam arti lebih luas Politik Luar Negeri yang bebas menunjukkan tingkat nasionalisme yang tinggi, yang menolak keterlibatan atau ketergantungan terhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia. Kedua, kata "aktif" menunjukkan bahwa Politik Luar Negeri Indonesia tidaklah pasif dan hanya mengambil sikap netral dalam menghadapi permasalahan-permasalahan international. Muqadimah UUD 45 secara jelas menuntut Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan dan ikut memajukan perdamaian dunia.

5. Pengertian Geopolitik

Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu “geo” dan “politik”. Maka, berbicara tentang pengertian geopolitik, tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. “Geo” artinya Bumi/Planet Bumi. Menurut **Preston E. James**, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan Bumi. Dengan demikian geografi bersangkut-paut

dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik, selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan.[31]

Dalam studi Hubungan Internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah / hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hirarki subyek: dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal.[32]

Dari beberapa pengertian diatas, pengertian geopolitik dapat lebih disederhanakan lagi. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai empat unsur yang pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan.

Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang paling utama mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang

---

[31] Hidayat, I. Mardiyono. *Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam*, Surabaya, Usaha Nasional, 1983, Hal. 5

[32] *Ibid,* Hal. 6

berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara di sekitarnya / negara tetangga merupakan pengaruh yang paling besar

C. Batas Kekuatan Nasional

1. Kekuatan Nasional Indonesia

Indonesia merupakan suatu negeri yang amat unik. Hanya sedikit negara di dunia, yang bila dilihat dari segi geografinya, memiliki kesamaan dengan Indonesia. Negara-negara kepulauan di dunia, seperti Jepang dan Filipina, masih kalah bila dibandingkan dengan negara kepulauan Indonesia.

Indonesia adalah suatu negara, yang terletak di sebelah tenggara benua Asia, membentang sepanjang seperdelapan panjang keliling Bumi, serta memiliki ribuan pulau.

Jika dilihat sekilas, hal ini adalah suatu kebanggaan dan kekayaan, yang tidak ada tandingannya lagi di dunia ini. Tapi bila dipikirkan lebih jauh, hal ini merupakan suatu kerugian tersendiri bagi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia terlihat seperti pecahan-pecahan pulau yang berserakan. Dan sebagai belasan ribu pulau yang tersebar sepanjang 3,5 juta mil, Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang amat sulit untuk dapat dipersatukan.

Maka, untuk mempersatukan Bangsa Indonesia, diperlukan sebuah konsep geopolitik yang benar-benar cocok digunakan oleh Bangsa Indonesia. Dalam perumusan konsep geopolitik tersebut maka

perlu untuk memahami tentang kondisi serta keadaan Indonesia ditinjau dari segi geografisnya, dimana hal tersebut dapat dijadikan kekuatan nasional Indonesia dalam membentuk konsep geopolitiknya.

Ada beberapa jenis kondisi geografis bangsa Indonesia. Yaitu kondisi fisis, serta kondisi Indonesia ditinjau dari lokasinya. Keberadaan Indonesia diantar dua benua, yaitu Asia dan Australia. Indonesia pun berada diantara dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Hindia inilah yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi politik di Indonesia.

Posisi silang seperti ini menyebabkan Indonesia menjadi suatu daerah Bufferzone, atau daerah penyangga. Hal ini bisa dilihat pada aspek-aspek dibawah ini:[33]

1) Politik
   Indonesia berada diantara dua sistem politik yang berbeda, yaitu demokrasi Australia dan demokrasi Asia Selatan;
2) Ekonomi
   Indonesia berada di antara sistem ekonomi liberal Australia dan sistem ekonomi sentral Asia;
3) Ideologis
   Indonesia berada diantara ideologi kapitalisme di Selatan dan komunis di sebelah utara;
4) Sistem Pertahanan
   Indonesia berada diantara sistem pertahanan maritim di selatan, dan sistem pertahanan kontinental di utara.

Selain menjadi daerah *Bufferzone*, Indonesia pun memperoleh beberapa keuntungan disebabkan kondisinya yang silang tersebut. Antara lain:[34]

---

[33] *Ibid,* Hal.8
[34] *Ibid,* Hal.8

1) Berpotensi menjadi jalur perdagangan Internasional;
2) Dapat lebih memainkan peranan politisnya dalam percaturan politik Internasional;
3) Lebih aman dan terlindung dari serangan-serangan negara kontinental.

Berbeda dengan pemahaman geopolitik negara lain yang cenderung mengarah kepada tujuan ekspansi wilayah, konsep geopolitik Indonesia, atau wawasan nusantara justru bertujuan untuk mempertahankan wilayah. Sebagai negara kepulauan yang luas, Bangsa Indonesia beranggapan bahwa laut yang dimilikinya merupakan sarana "penghubung" pulau, bukan "pemisah". Sehingga, walaupun terpisah-pisah, bangsa Indonesia tetap menganggap negaranya sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari "tanah" dan "air", sehingga lazim disebut sebagai "tanah air".

2. Pola Utama Perimbangan Kekuasaan

Keinginan pihak beberapa bangsa untuk memperoleh kekuasaan, masing-masing berupaya mempertahanankan atau menumbangkan *status quo*, memaksakan perkembangan ke arah suatu susunan atau konfigurasi yang disebut sebagai perimbangan kekuasaan[35] dan politik yang bertujuan untuk melestarikannya.

Perimbangan kekuasaan internasional hanya merupakan manifestasi khusus dari prinsip umum sosial yang menjadi sumber

[35] Istilah "perimbangan kekuasaan" ini dipakai dengan empat makna yang berbeda:
1. Sebagai politik yang bertujuan untuk mencapai suatu keadaan tertentu
2. Sebagai suatu keadaan nyata.
3. Sebagai distribusi kekuasaan yang kurang lebih sama.
4. Sebagai Sembarang distribusi kekuasaan.

Apabila istilah ini dipakai tanpa keterangan lebih lanjut, maka maksudnya adalah suatu keadaan nyata, di mana kekuasaan terbagi kurang lebih sama diantara beberapa bangsa.

otonomi bagi bagian-bagian pelengkap dari semua masyarakat yang terdiri dari berbagai unit otonomi; bahwa perimbangan kekuasaan dan politik sangat perlu sebagai faktor stabilitas di dalam masyarakat bangsa-bangsa yang berdaulat.; dan bahwa ketidakstabilan perimbangan kekuasaan internasional bukan disebabkan oleh kekeliruan prinsip itu, melainkan oleh kondisi-kondisi tempat prinsip tersebut harus menjabarkan diri di tengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa yang berdaulat.

Konsep tentang perimbangan kekuasaan memang banyak ditemukan aplikasinya di bidang internasional, nasional, didalam pemerintahan, dan politik luar negeri dan dalam negeri. Perimbangan kekuasaan merupakan suatu fenomena sosial yang universal namun fungsi dan hasilnya dalam politik luar negeri dan dalam negeri adalah berbeda.

Perimbangan kekuasaan dalam politik dalam negeri relatif stabil daripada dalam masyarakat yang terintegrasi, dipersatukan oleh opini umum yang kuat dan kekuasaan pemerintah pusat yang pada umumnya tidak dapat diganggu-gugat. Di dunia internasional di mana opini umum lemah dan kekuasaan pusat tidak ada, stabilitas masyarakat internasional dan kebebasan bagian-bagian antar entitasnya lebih banyak bergantung pada bekerjanya perimbangan kekuasaan.

Dengan tidak adanya suatu badan bersama yang tidak memihak untuk menafsirkan hukum internasional dan mengawasi hubungan-hubungan internasional, setiap negara menginginkan tidak hanya untuk memperbesar kekuasaanya sendiri melainkan juga untuk mencegah penambahan apapun kekuasaan-kekuasaan negara saingannya.

Hal ini merupakan aplikasi ke dalam politik internasional dari teori pengawasan dan perimbangan. Diasumsikan, dan hal itu benar bahwa jika ada suatu negara yang memperoleh kedudukan menonjol dalam urusan luar negeri maka negara tersebut jelas sekali akan menjadi ancaman terhadap kepentingan negara-negara lainnya. Kekuatan yang semula bertujuan untuk melindungi diri berubah menjadi ancaman terhadap perdamaian internasional dikarenakan negara-negara yang memiliki kekuatan tersebut merasa sudah lebih kuat dari musuh manapun.

Ada dua faktor yang mendasari masyarakat internasional; *pertama,* keanekaragamannya, *kedua* adalah konflik antar unsur-unsurnya, bangsa-bangsa itu sendiri. Aspirasi masing-masing bangsa untuk memperoleh kekuasaan dapat menimbulkan konflik. Dengan kata lain perebutan kekuasaan di bidang internasional dapat berlangsung menurut dua pola yang khas.

a) Pola Perlawanan Langsung

Bangsa A dapat menjalankan politik imperialistisnya terhadap bangsa B, dan bangsa B dapat menandingi politik itu dengan politik *status quo* atau dengan politiknya sendiri yang imperialistis, contohnya Prancis Melawan Rusia pada tahun 1912, Jepang melawan China pada tahun 1931-1941, Amerika Serikat melawan Sekutu (*axis*) sesudah tahun 1941, itu semua sesuai dengan pola tersebut. Pola tersebut merupakan salah satu dari perlawanan langsung di antara bangsa yang ingin menanamkan kekuasaan kepada bangsa lainya dan bangsa lainya ini menolak untuk menyerah.

Gambar.1 Skema Pola Perlawanan Langsung

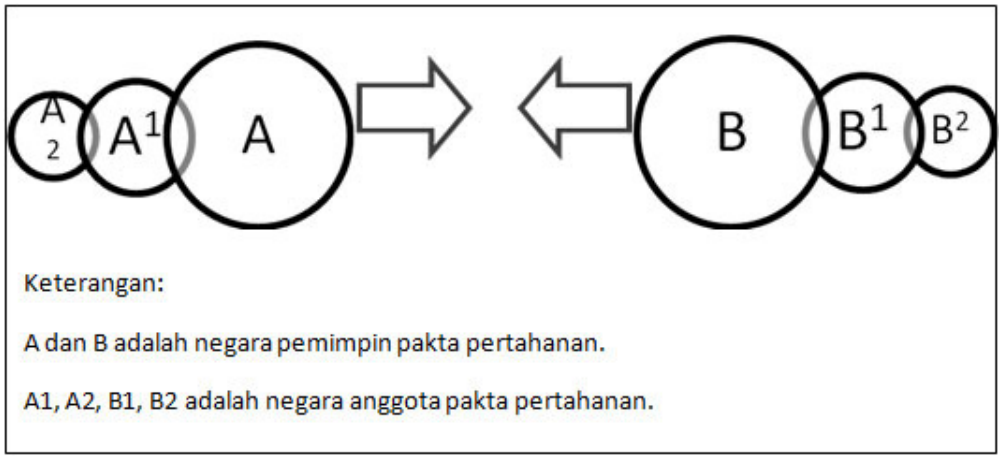

Dalam pola perlawanan langsung, perimbangan kekuasaan merupakan akibat langsung dari keinginan kedua bangsa supaya politiknya mengungguli bangsa lainnya. Bangsa A mencoba meningkatkan kekuasaanya terhadap bangsa B sampai pada tingkat bangsa tersebut dapat mengendalikan keputusan-keputusan bangsa

B, dan dengan demikian menuju keberhasilan politik imerialisnya. Sebaliknya, bangsa B akan mencoba menahan tekanan bangsa A dan dengan demikian dapat menggagalkan politik bangsa A.

Perimbangan kekuatan yang saling bertentangan ini akan berlangsung terus, peningkatan kekuasaan suatu bangsa mengundang paling tidak peningkatan yang setara dari bangsa lain, sampai salah satu bangsa mengubah tujuan politik imperialisnya, atau menggagalkannya sama sekali atau sampai salah satu bangsa memperoleh kelebihan atau dominasi untuk menentukan bangsa lainnya.

b) Pola Persaingan

Pada pola persaingan, seluk-beluk mekanisme perimbangan kekuasaan adalah identik dengan apa yang telah di uraikan, kekusaan bangsa A yang diperlukannya untuk mendominasi bangsa C, di mana bangsa A berhadapan melawan bangsa B, sedangkan pada gilirannya kekuasaan bangsa B untuk mendominasi bangsa C menjadi berimbang, kalau tidak terlampaui oleh kekuasaan bangsa A. Jika perimbangan kekuasaan antara bangsa A dan bangsa B tetap terjaga maka kemerdekaan bangsa C akan tetap terjaga.

Gambar.2 Skema Pola Persaingan 1.1

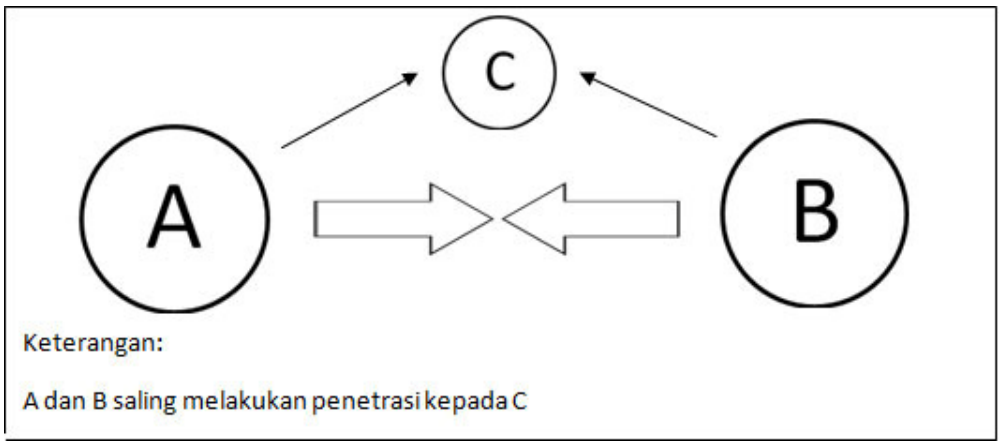

Jika hubungan-hubungan ini berubah secara pasti untuk keuntungan bangsa A, maka kemerdekaan bangsa C mendadak akan menjadi mengkhawatirkan.

Gambar.3 Skema Pola Persaingan 1.2

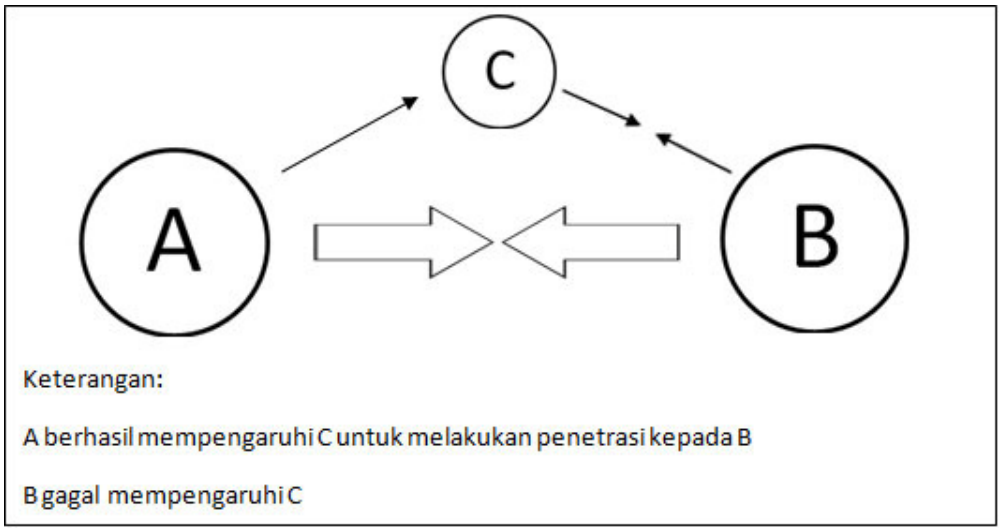

Jika bangsa B memperoleh keuntungan yang menentukan dan kekal, maka kemerdekaan bangsa C akan menjadi lebih aman setaraf dengan keuntungan tersebut.

Gambar.4 Skema Pola Persaingan 1.3

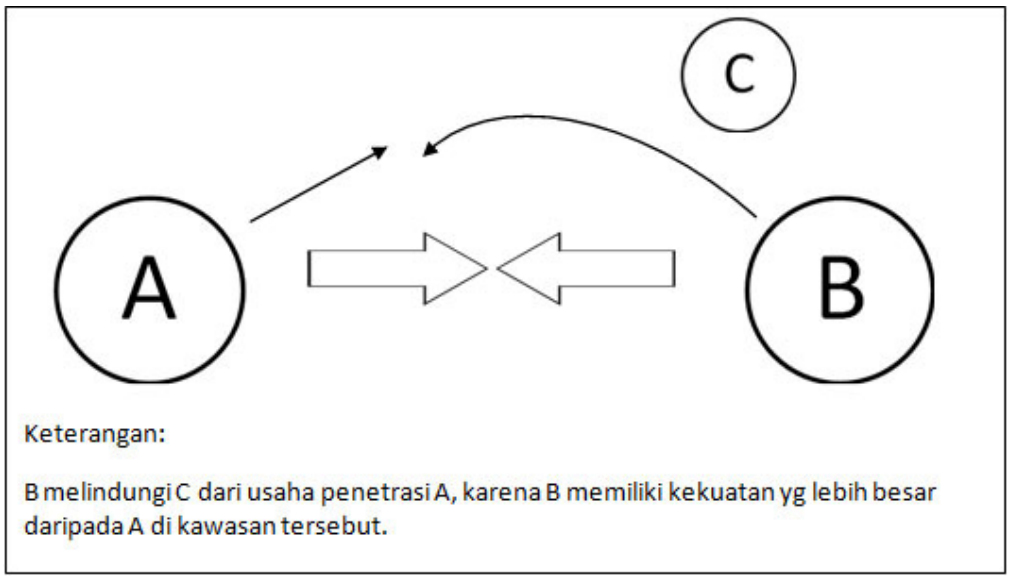

Dan akhirnya, jika bangsa A meninggalkan politik imperialisnya sama skali terhadap bangsa C atau memindahkan sasaran ke bangsa D, maka kemerdekaan bangsa C akan terjamin secara permanen.

Gambar.5 Skema Pola Persaingan 1.4

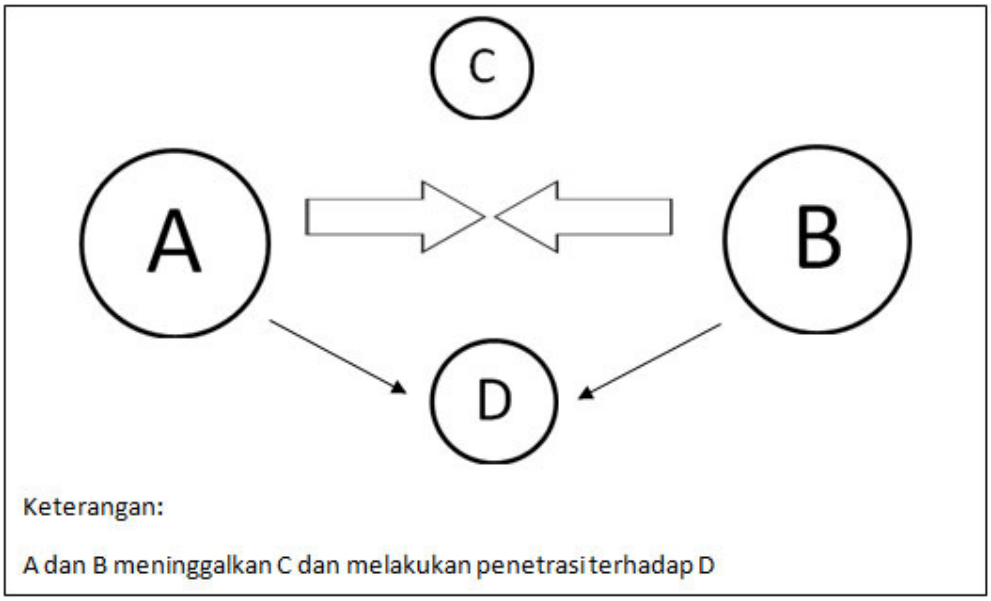

D. Regionalisasi dan Integrasi

1. Konsep Regionalisme

Berakhirnya perang dunia II dan meluasnya interdependensi antar bangsa melahirkan suatu fenomena baru dalam studi tentang hubungan antar negara. Teori hubungan internasional klasik yang meletakkan fokusnya pada power dan konstalasi politik antar negara kemudian memerlukan beberapa penyempurnaan karena keadaan global telah diwarnai dengan berkurangnya kapasitas negara serta kaburnya batas-batas kedaulatan negara memunculkan pola politik baru yang mengasosiasikan kepentingan nasional kedalam kepentingan regional (regionalisme) yang merupakan jalan keluar bagi pencapaian kepentingan nasional. Dengan kata lain regionalisme merupakan alternatif diantara nasionalisme dan interdependensi global yang terjadi.

Di antara pakar, ada silang pendapat tentang definisi regionalsme itu sendiri. Menurut **Joseph S. Jr. Nye**, regionalisme adalah sekelompok negara yang jumlahnya terbagatas yang berhubungan satu sama lain dalam batasan geografi dan adanya derajat interdependensi, sehingga regionalisme didefinisikan sebagai formasi dari pengelompokan antarnegara dalam basis suatu kawasan.[36]

---

[36] Asrudin & M.J. Suryana, *Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisional ke Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal.138

Cantori dan **Steven Spiegel** mendefinisikan regionalisme sebagai dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial dan sejarah dan perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari negara di luar kawasan.[37] Menurut **Roeslan Abdulgani** regionalisme dapat didefinisikan sebagai seuatu pengelompokan negara kebangsaan dengan tujuan untuk membentuk sebuah kesatuan politik yang jelas yaitu untuk terbentuknya ketertiban.[38]

Beberapa teoritis lain mengklasifikasikan suatu kawasan dalam lima karakteristik. *Pertama,* negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan memiliki kedekatan geografis. *Kedua*, memiliki kemiripan sosio-kultural. *Ketiga*, terdapatnya kemiripan sikap dan tindakan politik seperti yang tercermin dalam organisasi internasional. *Keempat*, kesamaan keanggotaan dalam organisasi internasional. Dan *kelima*, adanya ketergantungan ekonomi yang diukur dari perdagangan luar negeri sebagai bagian dari proporsi pendapatan nasional.

Dari berbagai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa regionalisme merupakan suatu paham yang menginginkan adanya kesatuan kerjasama dalam berbagai bidang yang akhirnya akan menjadi suatu entitas yang lebih besar. Sedangkan regionalisasi

[37] Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Op.cit*, Hal. 104

[38] Roeslan Abdulgani, *Problem Nasionalsime, Regionalisme dan Keamanan di Asia Tenggara*, Yogyakarta, Duta Wacana University Press, 1994, hal.19

merupakan sebuah proses menuju terciptanya kerja sama regional di berbagai bidang dalam suatu kawasan.

Perubahan konstalasi hubungan internasional membawa perkembangan pada perkembangan regionalisme itu sendiri. Menurut **Hettne** yang membagi tingkatan regionalisme ke dalam lima tahapan. Lima tahapan ini menunjukan kematangan suatu kawasan seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan internasional di kawasan. Tahapan tersebut adalah:[39]

Tabel.1 Tingkatan Regionalisme

Tahapan	**Kriteria**
Simple Geographic Unit of State	- Tidak ada interaksi rutin antar negara dalam kawasan. - Kerjasama hanya terjadi ketika ada ancaman. - Sangan bergantung pada sumber daya masing-masing negara.
Set of Social Interactions	- Dalam kawasan sudah tercipta interaksi antar Negara namun hanya diatur norma-norma atau institusi formal.
Collective Defense Organization	- Negara mulai bersekutu dalam suatu kawasan untuk melawan musuh bersama. - Ada perjanjian formal yang mengikat dan mengatur negara-negara dalam suatu kawasan. - Ada kombinasi kekuatan, mesku bukan berupa penggabungan.
Security Community	- Interaksi masyarakat sipil antar negara mulai berkembang. - Tercipta hubungan damai antar negara dalam kawasan. - Adanya kesepakatan untuk

[39] Hettne B. The New Regionalism and the Future of Security Development, European Journal of Development Reaserch vol.4.2000, London, Hal.83-106

	memilih menggunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan masalah.
Region State	- Kawasan sudah memiliki identitas bersama yang berbeda dari kawasan lain. - Kawasan memiliki kapabilitas bersama sebagai suatu kawasan. - Kawasan memiliki legitimasi sebagai satu kesatuan regional.

Perkembangan regionalisme di berbagai belahan dunia saat ini tergantung kepada pola interaksi dan hubungan antar negara dalam kawasan dalam menentukan tingkat regionalisme dalam kawasan mereka. Regionalisme saat ini bergantung dalam tiga hal. Yakni (1) dukungan dari kekuatan besar di dalam kawasan (*regional great power*), (2) tingkat interaksi antar negara dalam kawasan, dan (3) saling percaya antar negara dalam kawasan.[40] Melalui teori ini, dapat dipahami bahwa mengapa satu kawasan lebih tertinggal dibanding yang lain adalah karena permasalahan kekuatan dan keinginan negara yang bersangkutan untuk membentuk satu kawasan. Bisa jadi suatu kawasan tidak tercipta intergrasi karena memang intergrasi tersebut tidak diinginkan dan diupayakan oleh negara-negara di dalam kawasan tersebut.

2. Konsep Integrasi

Integrasi menitikberatkan perhatiannya pada proses di mana pemerintahan secara kooperatif bertalian bersama seiring dengan

[40] *Ibid,* Hal.83

perkembangan homogenitas kebudayaan, sensitivitas tingkah laku, kebutuhan sosial ekonomi, dan interdependensi yang dibarengi dengan penegakan institusi supranasional yang multi dimensi demi memenuhi kebutuhan bersama. Hasil akhirnya adalah kesatuan politik dari negara-negara yang terpisah di tingkat global maupun regional menuju terciptanya perdamaian dunia.[41]

Charles Pentland mendefinisikan integrasi politik internasional sebagai sebuah proses di mana sekelompok masyarakat, yang pada awalnya diorganisasikan dalam dua atau lebih negara yang mandiri, bersama-sama mengangkat sebuah keseluruhan politik yang dalam beberapa pengertian dapat digambarkan sebagai sebuah *community*.

Integrasi dapat dipahami sebagai suatu proses yang mengarah pada suatu kondisi yaitu (1) berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara, (2) penyerahan kekuasaan secara bertahap kepada institusi supranasional, (3) penyeragaman nilai, (4) terjadinya masyarakat global dan rekonstruksi norma dalam komunitas politik.[42]

Luasnya cakupan integrasi yang terdiri dari beberapa sistem yang berlainan memberikan kesulitan dalam memahami konsep integrasi. Untuk itu **Walter Jones** membagi integrasi dalam empat sektor yaitu:[43]

---

[41] Tom Travis, *Usefulness of Four Theories of International Relations in Understandings the Emerging Order*, Journal International Studies, Hal.31

[42] Martin Griffiths & Terry O'Callaghan, *International Relations: The Key Concepts*. Routledge, London, 2002, hal.155

[43] Asrudin & M.J. Suryana, *Op.cit,* hal.130

1) Integrasi Ekonomi, merupakan yang paling kompleks dan berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia. Integrasi ini dapat diupayakan melalui pasar bersama untuk meningkatkan potensi ekonomi melalui konsolidasi kebijakan.
2) Integrasi di sektor Sosial adalah pembelokan preferensi nasional menuju loyalitas bagi kesatuan politik yang lebih besar. Keberhasilan integrasi di sektor sosial ditentukan oleh toleransi bersama dan kesamaan nilai-nilai sosial politik negara-negara yang terlibat.
3) Integrasi Politik merujuk pada konsep integrasi yang sempit yaitu integrasi lembaga-lembaga politik pokok serta pengalihan kedaulatan atas kebijakan luar negeri ke tangan lembaga-lembaga institusional bersama. Tujuan pengalihan bukan untuk menghilangkan pemerintahan nasional, melainkan membatasi wewenangnya pada fungsi-fungsi tertentu.
4) Integrasi dalam sektor Keamanan dapat tumbuh dari persekutuan (aliansi) namun sebaiknya aliansi yang betul-betul integratif jarang ditemui. Dari beberapa fakta yang ditemui seperti NATO, terdapat dua kesimpulan yaitu integrasi keamanan harus didahului oleh integrasi politik mengingat pentingnya kebijakan strategis bagi kelangsungan hidup nasional dan pemerintah yang berkuasan. Dan yang kedua integrasi keamanan hanya berlangsung dalam masa-masa krisis yang muncul berasal dari kebutuhan vital yang mendesak bukan dari desakan-desakan domestik dan pertimbangan politik dan sosial.

Keempat bidang integrasi diatas yang saling terkait satu sama lain pada akhirnya akan mengarah pada tujuan akhir dari proses integrasi yaitu pada terbentuknya integrasi model negara dan model komunitas.[44] Dalam terminologi institusional, model negara sangatlah spesifik, terutama bagi pengaut faham Federalis dan Fungsional, dimana konsensus integrasi haruslah berdasarkan konstitusional dalam artian negara yang berdaulat yang menyatukan identitas nasionalnya dalam entitas politik baru yang legal. Sedangkan model

[44] Tom Travis, *Op.cit*, Hal.31

komunitas menitikberatkan pada proses yang terjadi dalam hubungan antar penduduk negara dengan sedikit keterlibatan negara.

E. Regionalisasi Kawasan Asia Tenggara (ASEAN)

Gambar 6. Peta Negara Anggota ASEAN

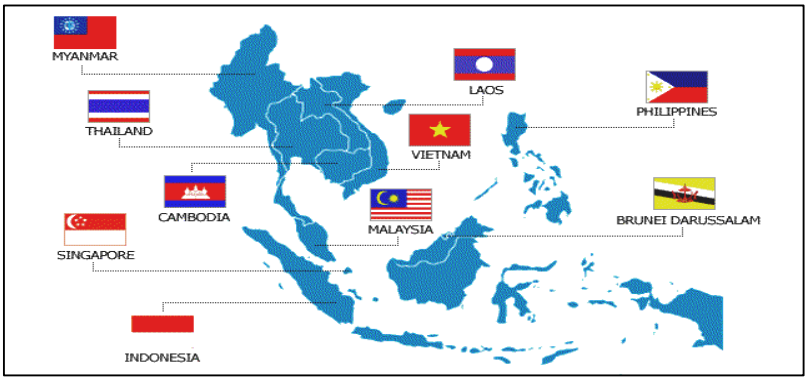

Sebelum terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa, regionalisme dalam arti suatu kelompok negara dengan suatu ikatan politik bersama telah ada. Contohnya adalah Doktrin Monroe dan Imperium Inggris (*British Empire*). Pasal 21 Covenant Liga Bangsa-Bangsa mengakui bahwa organisasi global harus berdampingan (*co-exist*) dengan kelompok-kelompok regional demikian seraya menyatakan bahwa "tidak ada suatu pengaturan dalam Covenant ini yang dianggap mengganggu validitas ikatan-ikatan internasional seperti perjanjian-perjanjian arbitrase atau saling pengertian regional (*regional understanding*) untuk menjamin pemeliharaan perdamaian."[45] Di dalam Piagam PBB dijelaskan bahwa:

"tidak ada ketentuan dalam charter yang merintangi keberadaan persetujuan-persetujuan regional atau badan-badan yang berkenaan dengan masalah-masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang patut bagi tindakan regional, sepanjang persetujuan-

[45] D.W. Bowett, *Hukum Organisasi Internasional,* Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.205

persetujuan atau badan-badan demikian itu sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB".[46]

1. Prinsip dan Tujuan Pembentukan ASEAN

ASEAN lahir karena adanya saling membutuhkan diantara negara-negara di regional kawasan Asia Tenggara, serta tumbuhnya kesadaran akan perlunya kerja sama untuk meningkatkan taraf hidup, meredakan konflik di antara bangsa-bangsa[47] dan juga untuk memperkuat ikatan regional negara-negara sebagai bentuk perimbangan kekuatan di kawasan regional Asia Tenggara. Persetujuan bersama yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 1966 sebagai hasil persidangan bulan Juni di Bangkok, memulihkan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia yang sempat memanas di era orde lama memberikan harapan besar untuk persatuan di Asia Tenggara.

Pada tanggal 5 hingga 8 Agustus 1967 lima Menteri Luar Negeri negara-negara Asia Tenggara mengadakan pertemuan di Bangkok. Hasil dari pertemuan ini dikenal dengan Deklarasi Bangkok yang kemudian melahirkan organisasi di regional kawasan Asia Tenggara yang bernama *Association of South East Asian Nation* (ASEAN).

Adapun adanya organ dan hukum yang berlaku, ASEAN sebagai organisasi internasional di kawasan regional Asia Tenggara memiliki organ yang dapat di lihat pada pembahasan selanjutnya yaitu

[46] Pasal 52 Ayat (1) Piagam PBB
[47] M. Sabir, *ASEAN Harapan dan Kenyataan,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, Hal.25

mengenai struktur ASEAN, sedangkan hukum yang berlaku bagi ASEAN adalah hukum internasional.

a) Prinsip-Prinsip Asean

Adapun prinsip-prinsip utama ASEAN dalam menjalankan fungsi dan tujuanya yaitu:[48]

1) Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan derajat integritas territorial dan identitas nasional semua negara.
2) Hak setiap Negara untuk hidup bebas dari pada campur tangan luar, dan paksaan.
3) Tidak mencampuri urusan dalam negeri.
4) Penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai.
5) Tidak melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan.
6) Mengadakan kerjasama efektif di antara sesama mereka.

b) Tujuan ASEAN

Tujuan ASEAN seperti yang termuat dalam deklarasi Bangkok yaitu:[49]

1) Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
2) Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum didalam hubungan antar negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB.
3) Untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.
4) Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi.
5) Untuk berkerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industry mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi

[48] M. Sabir, *Op.cit,* Hal.68
[49] Melihat Perjalanan KTT ASEAN Bagi Indonesia. (http://www.bainfokom.go.id/open.php)

internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka.
6) Untuk memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara.
7) Untuk memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling berkerjasama secara erat diantara mereka sendiri.

2. Keanggotaan ASEAN

Sesuai dengan pasal 4 Deklarasi Bangkok, keanggotaan ASEAN terbuka bagi seluruh negara-negara Asia Tenggara dengan syarat negara-negara calon anggota dapat menyetujui dasar-dasar dan tujuan organiasasi ASEN seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN dan semua traktat/persetujuan yang telah dibuat ASEAN. Disamping itu, perlu adanya kesepakatan semua Negara anggota ASEAN mengenai keanggotaan baru ASEAN.

ASEAN pada awal pembentukannya beranggotakan 5 negara yakni: Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina, dan Singapura. Proses perluasan keanggotaan ASEAN hingga tercapainya ASEAN-10 adalah sebagai berikut:[50]

1) Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, dalam Sidang Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta.
2) Viet Nam diterima menjadi anggota ke-7 ASEAN dalam Pertemuan Para Menteri Luar Negeri (AMM) ke-28 pada tanggal 29 – 30 Juli 1995 di Bandar Seri Begawan.
3) Laos dan Myanmar diterima sebagai anggota penuh ASEAN melalui suatu upacara resmi pada tanggal 23 Juli 1997 dalam rangkaian Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, tanggal 23-28 Juli 1997.
4) Kamboja diterima sebagai anggota penuh ASEAN pada

[50] http://www.deplu.go.id/Documents/ASEAN%20Selayang%20Pandang.doc diakses pada 20 November 2010

upacara penerimaan resmi di Ha Noi tanggal 30 April 1999.

3. Struktur ASEAN

Struktur organisasi ASEAN yang selama ini berdasarkan Deklarasi Bangkok mengalami perubahan paska penandatanganan Piagam ASEAN. Struktur sesuai Deklarasi Bangkok selama ini terdiri dari : Konferensi Tingkat Tinggi (KTT); Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/*AMM); Pertemuan Menteri-menteri sektoral (Sectoral Bodies Ministerial Meeting); Sidang Panitia Tetap ASEAN (*ASEAN Standing Committee*/ASC).

Struktur organisasi ASEAN yang baru sesuai dengan Piagam ASEAN terdiri dari:[51]

1) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebagai pengambil keputusan utama, yang akan melakukan pertemuan minimal 2 kali setahun;
2) Dewan Koordinasi ASEAN (*ASEAN Coordinating Council*) yang terdiri dari para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan tugas mengkoordinasi Dewan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community Councils*);
3) Dewan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community Councils*) dengan ketiga pilar komunitas ASEAN yakni Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community Council)*, Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Council)*, dan Dewan Komunitas Sosial-Budaya (*ASEAN Socio-Cultural Community Council).*
4) Badan-badan Sektoral tingkat Menteri (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies).
5) Komite Wakil Tetap untuk ASEAN yang terdiri dari Wakil Tetap negara ASEAN, pada tingkat Duta Besar dan berkedudukan di Jakarta.
6) Sekretaris Jenderal ASEAN yang dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretariat ASEAN.
7) Sekretariat Nasional ASEAN yang dipimpin oleh pejabat senior untuk melakukan koordinasi internal di masing-masing negara

[51] http://www.deplu.go.id/Documents/ASEAN%20Selayang%20Pandang.doc diakses pada 20 November 2010

ASEAN.

8) *ASEAN Human Rights body* yang akan mendorong perlindungan dan promosi HAM di ASEAN.
9) Yayasan ASEAN (*ASEAN Foundation*) yang akan membantu Sekjen ASEAN dalam meningkatkan pemahaman mengenai ASEAN, termasuk pembentukan identitas ASEAN.
10) *Entities associated with ASEAN*

4. Dasar Hukum Pembentukan ASEAN

ASEAN adalah organisasi internasional yang didirikan dalam persidangan tanggal 5-8 Agustus 1967 di Bangsaen Bangkok dalam pertemuan ini keberadaan pangkalan asing menjadi perdebatan antara Adam Malik dari Indonesia dan Narsisco Ramos dari Philipina, karena dalam rancangan Indonesia tentang organisasi ini bahwa pangkalan asing bersifat sementara dan tidak boleh digunakan langsung atau tidak langsung untuk menumbangkan kemerdekaan negara-negara di kawasan itu. Sedangkan Philipina mengkhawatirkan hal ini dapat menyulitkan hubungannya dengan Amerika Serikat. Akhirnya dicapai kompromi bahwa pangkalan itu ada selama diinginkan negara yang bersangkutan. Pada tanggal 8 Agustus 1967, dalam rapat terbuka di Bangkok, ditanda tanganilah Deklarasi Asean yang menjadi dasar hukum pembentukan ASEAN.[52]

Tidak seperti lazimnya perjanjian internasional multilateral yang pendiriannya memakai bentuk formal yakni memiliki instrumen pokok, maka pendirian ASEAN tidak memakai bentuk formal dalam artian tidak memerlukan ratifikasi dari para anggotanya. Walaupun tidak

[52] M. Sabir, *Op.cit*, Hal.43

disertai dengan instrumen pokok, para wakil dari lima negara di Asia Tenggara pada waktu itu yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina dan Thailand telah mengadakan pertemuan di Bangkok dan telah memutuskan untuk membentuk apa yang disebut Association of South East Asian Nations (ASEAN) tanpa perjanjian atau persetujuan didalam bentuk instrument pokok yang akan diratifikasi oleh para anggotanya, melainkan hanya suatu deklarasi yang ditandatangani oleh kelima Menteri Luar Negeri negara-negara tersebut. Dengan demikian sebenarnya adanya persetujuan internasional dalam arti multilateral adalah tidak mutlak.[53]

5. Kerjasama ASEAN dalam Bidang Politik

Politik luar negeri suatu negara pada dasarnya merupakan alat utuk memperjuangkan dan mencapai kepentingan nasional suatu negara, ia merupakan kebijaksanaan dan strategi satu bangsa untuk bergaul dengan bangsa-bangsa lain yang disusun atas dasar kepentingan nasional bangsa itu.[54] Pembentukan ASEAN dilakukan dengan sasaran geopolitik yang jelas[55], yaitu mentransformasikan wilayah ini menjadi suatu wilayah dimana para anggotanya sendirilah yang menentukan politik internasional mereka.

Diawal pendirian ASEAN para anggotanya menyadari bahwa masalah politik merupakan hal yang sangat peka bagi setiap anggota.

---

[53] Sumaryo Suryo Kusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta, PT. Tata Nusa, Hal.13

[54] C.P.F Luhulima, *Op.cit*, Hal.183

[55] Geopolitik di sini diartikan sebagai suatu proses interaksi antar negara-negara ASEAN untuk mencapai sasaran-sasaran strategis mereka masing-masing melalui upaya berasama

Tetapi tidak jarang bila dihadapkan pada *fait accompli*[56], mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain mengadakan juga pertukaran pikiran mengenai perkembangan politik kawasn hanya saja itu tidak mereka anggap sebagai agenda utama ASEAN.[57]

Dalam menyikapi perkembangan politik internasional dan mempertimbangkan gagasan Malaysia mengenai netralisasi Asia Tenggara, maka para menteri luar negeri ASEAN mengadakan sidang istimewa pada tanggal 26-27 November 1971 di Kuala Lumpur, dan pada 27 November 1971 menandatangani suatu deklarasi, yang kemudian dikenal dengan nama ZOPFAN, kependekan dari *Zone of Peace, Freedom and Neutrality*.[58]

Ide ZOPFAN diharapkan dapat memberikan kejelasan hubungan antara tujuan kerja sama keamanan multilateral dan strategi apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan itu.[59]

Berakhirnya perang dingin dan perubahan dramatis di bidang politik membuka peluang bagi ASEAN untuk mewujudkan visinya tentang suatu tata regional di atas perbedaan ideology dan geopolitik. Kepergian negara-negara adidaya dari regional kawasan Asia Tenggara merupakan langkah penting menuju regional kawasan Asia Tenggara yang independen.

---

[56] Keadaan yang harus dihadapi
[57] M. Sabir, *Op.cit*, Hal.113
[58] *Ibid,* Hal.118
[59] Banarto Bandoro dan Ananta Gondomono, *ASEAN dan Tantangan Satu Asia Tenggara,* Centre for Strategi and International Studies, Jakarta, 1997, Hal.124

6. Kerjasama ASEAN dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Seperti halnya bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan bukanlah menjadi prioritas kerjasama ASEAN pada awal pembentukanya.[60] Tujuan dan sasaran ASEAN adalah pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan wilayah, termasuk didalamnya memajukan permadaian dan stabilitas kawasan melalui penghormatan keadilan, rule of law dan setia pada prinsip-prinsip piagam PBB.

Untuk mencapai tujuan tersebut kerjasamaharus dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk diidang politik yang sendirinya masih dapat pula dicakup, karena secara politis negara-negara anggota ASEAN masih dimungkinkan mengadakan kerjasama tanpa membawa akibat yang menyulitkan. Tetapi tidak demikian halnya dengan bidang pertahanan dan keamanan, seperti diketahui bahwa negara-negara ASEAN selain Indonesia semuanya masih mengandalkan paying keamanan negara besar dalam hal ini negara barat.[61]

Konflik yang selama perang dingin di tekan ke bawah untuk tidak memprovokasi konfrontasi adfikuasa di wilayah ini kini muncul dengan lebih bebas. Kenyataan ini mendesak ASEAN untuk meningkatkan postur militer mereka guna mempertinggi keamanan dan pertahanan nasional masing-masing Negara untuk ikut menangkal

---

[60] M.Sabir, *Op.cit,* Hal. 138
[61] *Ibid,* Hal. 179

ancaman potensial dari luar menuju perwujudan suatu masadepan yang tentram.[62]

Pembentukan ASEAN *regional forum* sebagai kerjasama keamanan multilateral dimaksudkan agar ASEAN dan para mitra dialognya bisa bekerja sama.[63] ARF diharapkan menjadi kunci utama kerangka dan pengaturan keamanan Asia Tenggara pada khususnya dan Asia Pasifik secara keseluruhan.

7. Kerjasama ASEAN dalam Bidang Hukum

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan penegakan hukum dan jaminan keamanana bagi negara anggotanya, ASEAN telah menyusun draft *ASEAN Political Security Community Blueprint* untuk dapat disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand, Desember 2008.

ASEAN SOM Working Group (SOM WG) telah sepakat membagi menjadi 3 karakteristik yaitu: A) *a Rules-based Community of Shared Values and Norms*; (B) *a Cohesive, Peaceful, and Resilient Region which Shared Responsibility for Comprehensive Security,* dan (C) *a Dynamic and Outward Looking Region in a Globalized World*. [64]

Dalam kaitan ini, berbagai usulan Indonesia telah dapat diterima seperti antara lain:[65]

1. Mendorong *voluntary electoral observations;*

[62] C.P.F. Luhulima, *Op.cit*, Hal.293
[63] Banarto Bandoro dan Ananta Gondomono, *Op.cit,* Hal.116
[64] Dian Triansyah Djani, *Selayang Pandang ASEAN*, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Jakarta, 2008, Hal.23
[65] *Ibid,* Hal.24

2. Pembentukan Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
3. Memasukkan elemen memerangi korupsi dan pemajuan prinsip demokrasi;
4. Gagasan pembentukan *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation*;
5. Gagasan tentang pembentukan *ASEAN Maritime Forum*;
6. Kerjasama penanganan *illegal fishing*;
7. Penyusunan instrumen ASEAN tentang Hak Pekerja Migran.

Selain itu ASEAN mmembentuk instrumen-instrumen yang memiliki korelasi dan bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum di kawasan Asia Tenggara, antara lain dengan menyusun:

a) Piagam ASEAN (ASEAN *Charter*)

Penyusunan Piagam ASEAN bertujuan untuk mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki *legal personality*, berdasarkan aturan yang profesional (*rule-based organization*), serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Piagam ini telah ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke-13 di Singapura, November 2007. Piagam ASEAN akan mulai berlaku efektif dengan diratifikasinya Piagam tersebut oleh kesepuluh negara anggota. Indonesia telah menjadi negara kesembilan yang meratifikasi Piagam ASEAN dan Thailand menjadi negara kesepuluh pada bulan November 2008. Dengan demikian, Piagam ASEAN dapat berlaku efektif mulai saat pelaksanaan KTT ASEAN ke-14 yang diselenggarakan di Chiang Mai, Thailand, pada bulan Desember 2008.

b) Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*/MLAT)

Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN *Member Countries* (MLAT) ini merupakan perjanjian mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana di antara Negara-negara ASEAN. Perjanjian ini ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 29 November 2004 oleh delapan Negara anggota ASEAN.[66]

Perjanjian MLAT dirinci dalam 32 pasal dengan ruang lingkup yang cukup luas. Pada pokoknya bantuan timbal balik itu meliputi penyidikan, penuntutan dan proses peradilan pidana. Hal ini diperlukan karena penyidikan, penuntutan dan proses peradilan pidana tidak cukup hanya dilakukan dengan mengekstradisi pelaku kejahatan, namun juga sangat diperlukan bantuan keterangan, data, dan saksi bagi pemeriksaan pelaku kejahatan.[67]

MLAT ini tidak berlaku untuk penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan seseorang. Selain itu, Pihak Diminta juga bisa menolak permintaan bantuan jika menurutnya permintaan itu berkaitan dengan tindak pidana politik.[68] Mengenai biaya, sebagaimana ketentuan Pasal 25, Pihak Diminta hanya menanggung biaya yang bersifat umum. Adapun Pihak Peminta mesti menanggung biaya pengacara, upah dan biaya untuk saksi ahli.

---

[66] Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam

[67] DPR Ratifikasi Perjanjian MLA ASEAN, http://www.hukumonline.com// diakses pada 7 Maret 2011

[68] Pasal 2 *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among Like- Minded ASEAN Member Countries*

Biaya lain yang harus ditanggung Pihak Peminta adalah biaya penerjemahan, penafsiran dan transkrip.[69]

c) Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (*ASEAN Convention on Counter Terrorism*/ACCT)

ACCT ditandatangani pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, Januari 2007. Indonesia sebagai *Lead Sheppherd* di bidang pemberantasan terorisme telah memelopori proses perumusan ACCT. Konvensi ini memberikan dasar hukum yang kuat guna peningkatan kerjasama ASEAN di bidang pemberantasan terorisme. Selain memiliki karakter regional, ACCT bersifat komprehensif (meliputi aspek pencegahan, penindakan, dan program rehabilitasi) sehingga memiliki nilai tambah bila dibandingkan dengan konvensi sejenis.

d) Rencana Pembentukan Traktat Ekstradisi ASEAN

Rencana pembentukan traktat ekstradisi ASEAN merupakan amanat Bali Concord 1976 dan Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN. Para pejabat tinggi ASEAN di bidang hukum dalam pertemuan ASEAN *Senior Law Officials Meeting* (ASLOM) Ke-11 di Siem Reap, Kamboja, 29-30 Januari 2007, menyepakati untuk membentuk kelompok kerja untuk memulai proses perumusan traktat ekstradisi ASEAN.

[69] *Op.cit*. Pasal 25